

**ANALISIS PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI
BUKU PELAJARAN UMUM UNTUK MENDAPATKAN
PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
OLEH PUSAT PERBUKUAN DEPDIKNAS JAKARTA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**MULYANINGSIH
0606144823**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
SEPTEMBER 2008**

**ANALISIS PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI
BUKU PELAJARAN UMUM UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
OLEH PUSAT PERBUKUAN DEPDIKNAS JAKARTA**

TESIS

**MULYANINGSIH
0606144823**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
SEPTEMBER 2008**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mulyaningsih
NPM : 0606144823
Tanda Tangan :
Tanggal : 4 September 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Mulyaningsih
NPM : 0606144823
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Pemberian Rekomendasi Sebagai Buku
Pelajaran Umum Untuk Mendapatkan Pembebasan
Penaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pusat
Perbukuan Depdiknas Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Dwi Martani

Penguji : Dr. Ronny K. Moentoro

Penguji : M. Ichsan, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 September 2008

Mengetahui,
Ketua Program


Dr. Endawati Gani
NIP. 131 653 464

KATA PENGANTAR

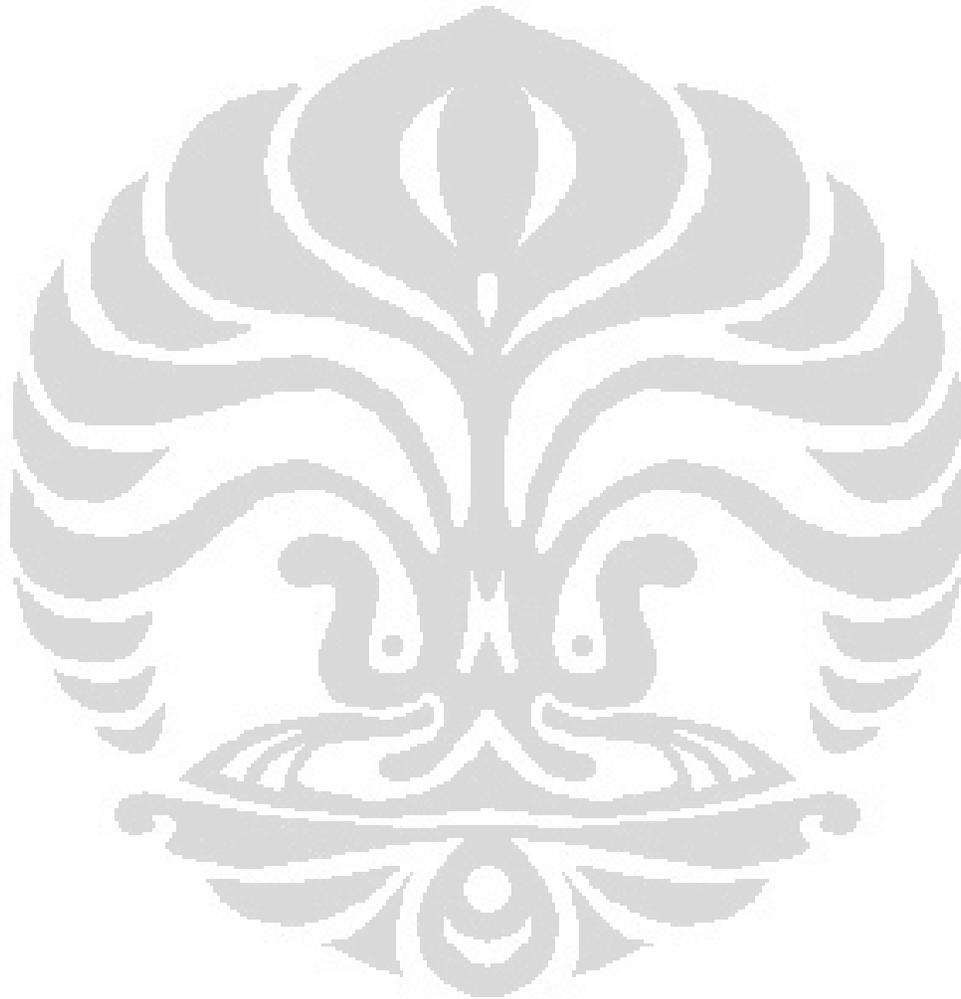
Segala ungkapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas berkat dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan dan dorongan moril maupun material dari pihak-pihak berikut ini:

- (1) Dr. Dwi Martani, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran-saran perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.
- (2) Dr. Ronny K. Moentoro dan M. Ichsan, M.Si. selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran-saran perbaikan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
- (3) Bapak, Ibu dosen di lingkungan Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
- (4) Seluruh keluargaku, bapak ibu di Jogja dan kakak-kakak, keponakan-keponakan yang selalu memotivasi untuk tidak kenal menyerah dalam hidup. Suamiku Herman Muchtar, anakku Ita, dan adek kecil yang masih di perut ibu, trima kasih atas kesabaran dan kehilangan banyak waktu bersama. Mbak Nur yang selalu setia membantu pekerjaan rumah, terima kasih.
- (5) Kepala Pusat Perbukuan, Pejabat Eselon III dan IV Pusat Perbukuan yang telah memberikan ijin penulis belajar di MAKSI UI dan Teman-teman di Pusat Perbukuan Jakarta khususnya pokja PPN yang telah membantu penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
- (6) Teman-teman kelas AKP01 2006 Program Maksi UI atas kebersamaan selama perkuliahan.
- (7) Karyawan Maksi UI: Mbak Sara, Mbak Era, Mbak Debo, Mas Bambang dll yang telah membantu selama penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa semua bantuan tersebut, kiranya tidak mungkin tesis ini dapat penulis selesaikan. Penulis juga menyadari masih banyak keterbatasan dan masih jauh dari sempurna dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis menunggu saran membangun dan kritik dari pembaca tesis ini. Dan semoga tesis ini mendatangkan manfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 4 September 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyaningsih
NPM : 0606144823
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS PEMBERIAN REKOMENDASI SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) OLEH PUSAT PERBUKUAN DEPDIKNAS JAKARTA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan kata (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2008
Yang menyatakan

(Mulyaningsih)

ABSTRAK

Nama : Mulyaningsih
Program Studi : Akuntansi Pemerintahan
Judul : Analisis Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk mendapatkan Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta

Dalam proses pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar dan merupakan sumber dana pembangunan terbesar yang berasal dari dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu bentuk pajak dimana merupakan jenis pajak tidak langsung dan dapat dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dapat dilakukan di dalam negeri dalam bentuk penyerahan, maupun dari luar negeri dalam bentuk impor. Buku-buku pelajaran umum yang dapat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk barang kena pajak tertentu yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tanpa diwajibkan memiliki surat keterangan Bebas PPN, kecuali untuk impor dan atau penyerahan buku-buku tertentu yang memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum. Dimana pembebasan diberikan berdasarkan rekomendasi dari Departemen terkait. Dalam kaitannya dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku mempunyai fungsi strategis. Fungsi strategis tersebut karena Pusat Perbukuan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum sehingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya akhir ini adalah kualitatif deskriptif melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan untuk kemudian melakukan analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sebagian besar berasal dari penyerahan dan atau import buku-buku yang berkategori buku pelajaran umum dan sebagian kecil dari buku-buku yang belum berkategori buku pelajaran umum.

Hasil analisis pada saat pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi, proses surat masuk sesuai tata administrasi yang berlaku di Pusat Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Sementara hasil analisis terhadap proses penelaahan oleh tim penelaah ditemukan masih diperlukan adanya analisis *cost* terhadap harga jual buku, perlu ditambahkan anggota penelaah sebagai *cost accounting*, diperlukan penilaian resiko terhadap buku-buku yang akan diberikan rekomendasi, diperlukan kriteria terhadap objektivitas sebagai tim penelaah, belum adanya *post audit* terhadap pemohon rekomendasi. Dengan demikian hasil analisis menunjukkan bahwa proses penelaahan oleh tim penelaah belum berjalan dengan baik. Hasil analisis terhadap penerbitan surat rekomendasi oleh Kepala Pusat Perbukuan menunjukkan bahwa proses tersebut belum dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan masih seringkali terbentur dengan masalah birokrasi.

Internal Control dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sudah dilakukan. Analisis pengendalian internal menunjukkan bahwa untuk aspek lingkungan pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek penilaian resiko belum dijalankan dengan maksimal karena proses identifikasi dan penilaian resiko dalam rangka pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secara eksplisit; untuk aspek aktivitas pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek informasi dan komunikasi belum dilakukan secara maksimal karena komunikasi ekstern dalam bentuk pengumuman, brosur, ataupun website belum ada dan untuk aspek pengawasan sudah dilakukan dengan baik..

Kata kunci:

PPN, buku pelajaran umum, PPN dibebaskan, Pusbuk, fungsi strategis, *internal control*.



ABSTRACT

Name : **Mulyaningsih**
Program of Study : **Governmental Accounting**
Title : **Analysis of Recommendation on General Books**
In order to gain Value Additional Tax from Book Centre,
Ministry of National Education, Jakarta

In development process, tax in Indonesia is the biggest resource and the main domestic resource. Additional value tax is the direct tax for the attained tax of businessman who carries out the item; later on he/she has to pay a tax, and or tax hospitality done domestically in the form of admittance, likewise in the importing form will do if the item comes from abroad. The general textbooks which have the important role on education, including the gained item tax for import which the admittance is free from tax without noticing the free tax letter of recommendation, except for import and or certain books need some approval as the general textbooks. Free of recommendation is given based upon recommendations come from the relevant department. In connection with the book quality control, Division of Book Quality Control at Book Centre has the strategic function. The strategic function is given recommendation as the general books in order to get the free value additional tax.

Research of methodology used in this paper is qualitative description by library research, secondary data collection and field observation and to be continued on composing analysis based upon theory in accordance with the rule and law. As far as we are concerned, most of recommendation to get free valued additional tax are coming from the importing books in general textbooks category, some of them are not categorized as the general textbooks.

The result of analysis when registering the books in order to get recommendation, the incoming letters administratively are processing in good condition by Book Centre. The result of analysis of review processed by reviewer, the reviewer has opinion about cost analysis to textbooks price, it needs a member of reviewer as cost accounting. We need the risk evaluation towards the recommended books., needed criteria the objectives as the reviewer, in this case no post audit provided here. The final analysis shows that the reviewing process done by reviewer shows that the process has not been done optimally due to the bureaucracy problems.

Internal control in making general textbook recommendation to get free valued additional tax at Book Centre has been well done. The result of internal control shows that all aspects of control have been well done likewise; the risk aspect has not been optimally done due to identification process and the risk assessment is not explicitly done; aspect of control has been well done; aspects of information and communication have not been optimally done because of external communication appears in the form of announcement, brochures, and website which are not provided.

Keywords:

Value Added Tax, general textbooks, free value added tax, Book Centre, strategic function, internal control.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Bagi Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta	6
1.5.2 Bagi Ilmu Pengetahuan	6
1.6 Metode Penelitian	6
1.7 Sistematika Penelitian	7
2. LANDASAN TEORI	8
2.1 Pajak Pertambahan Nilai (<i>Value Added Tax</i>)	8
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (<i>Value Added Tax</i>)	8
2.1.2 Karakteristik PPN	11
2.1.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP)	13
2.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai	14
2.1.5 Tarif dan Penghitungan PPN	16
2.1.6 Restitusi PPN	17
2.1.7 Mekanisme Pengkreditan PPN	18
2.1.8 Pembebasan PPN	19
2.2 Pengertian Buku Pelajaran Umum	21
2.3 Kategori Buku yang Tidak Termasuk Buku pelajaran Umum	22
2.4 Pengendalian Internal/ <i>Internal Control</i>	23
3. GAMBARAN UMUM PUSAT PERBUKUAN DEPDIKNAS JAKARTA	28
3.1 Sejarah Pusat Perbukuan	28
3.1.1 Latar Belakang Pendirian Pusat Perbukuan	28
3.1.2 Restrukturisasi Pusat Perbukuan	28
3.1.3 Pusat Perbukuan dan Lembaga Lain	29
3.2 Profil Pusat Perbukuan	31
3.3 Struktur Organisasi Pusat Perbukuan, Depdiknas, Jakarta	33
3.4 Tugas dan Fungsi Pusat Perbukuan	34
3.5 Kebijakan Penelaahan Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	36

3.5.1	Sasaran	37
3.5.2	Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	38
3.5.3	Persyaratan Administrasi Permohonan	39
3.5.4	Ruang Lingkup Aspek Penelaahan	42
3.5.5	Keanggotaan dan Masa Tugas Tim Penelaah	44
3.5.6	Tugas dan Fungsi Tim Penelaah	45
3.5.7	Hasil Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	45
4.	ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	46
4.1	Analisis Prosedur Pemberian Rekomendasi	46
4.1.1	Analisis pada saat Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi	46
4.1.2	Analisis Proses Administrasi Surat Masuk sesuai Tata Administrasi yang Berlaku Di Pusat Perbukuan.....	47
4.1.3	Analisis Proses Penelaahan oleh Tim Penelaah	47
4.1.3.1	Analisis Penelaahan Buku Pelajaran Umum yang Berasal dari Impor dan dari Penyerahan Dalam Negeri	47
4.1.3.1.1	Analisis Pemeriksaan Administrasi ..	47
4.1.3.1.2	Analisis Pemeriksaan Teknis	50
4.1.3.2	Analisis Penelaahan Buku yang Tidak Termasuk dalam Kategori Buku Pelajaran Umum untuk Disahkan sebagai Buku Pelajaran Umum	53
4.1.3.2.1	Analisis Pemeriksaan Administrasi ..	53
4.1.3.2.2	Analisis Pemeriksaan Teknis	53
4.1.4	Analisis Pemberian Surat Rekomendasi Kepala Pusat Perbukuan	54
4.1.5	Analisis Pengendalian Internal terhadap Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN di Pusbuk	55
4.1.5.1	Analisis Lingkungan Pengendalian	55
4.1.5.2	Analisis Penilaian Resiko (<i>Risk Assessment</i>)	56
4.1.5.3	Analisis Aktivitas Pengendalian (<i>Control Activities</i>).....	57
4.1.5.4	Analisis Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)	57
4.1.5.5	Analisis Pengawasan (<i>Monitoring</i>)	58
4.1.6	Analisis Umum Pemberian Rekomendasi.....	59
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1	Kesimpulan Hasil Penelitian	61
5.2	Rekomendasi atau Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Pengendalian Internal.....	24
Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Perbukuan	34
Gambar 3. Prosedur Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Pemberian Rekomendasi dan pengesahan Buku pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai	68
Lampiran 2. Instrumen Pemeriksaan Persyaratan Kelengkapan Administrasi dalam rangka Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk mendapatkan Pembebasan PPN kategori Buku Impor	69
Lampiran 3. Instrumen Pemeriksaan Persyaratan Kelengkapan Administrasi dalam rangka Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk mendapatkan Pembebasan PPN Kategori Buku Penyerahan Dalam Negeri ...	70
Lampiran 4. Format Pemeriksaan Kategori Buku yang akan Direkomendasikan sebagai Buku Pelajaran Umum	71
Lampiran 5. Instrumen Penelaahan Buku yang Dikecualikan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Dikategorikan sebagai Buku pelajaran Umum.....	72
Lampiran 6. Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2008.....	73
Lampiran 7. Contoh Surat Rekomendasi Pembebasan Pengenaan PPN yang Dikeluarkan oleh Kepala Pusat Perbukuan beserta lampirannya.....	74

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber dana pembangunan terbesar yang berasal dari dalam negeri. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, sebab dana yang dihimpun dapat berasal dari rakyat (*private sektor*) atau dari pemerintah (*public saving*).

Menurut R. Marsury (1999), pajak pada dasarnya mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi penerimaan (*budgeteir*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*reguler*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian juga terhadap barang mewah.

Diantara kedua fungsi pajak tersebut, maka fungsi yang utama adalah pajak sebagai pengisi kas negara, sedangkan fungsi mengatur merupakan fungsi tambahan walaupun kedua fungsi tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya walaupun pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga tetap harus dipertimbangkan berbagai dampaknya terhadap masyarakat baik dampak sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

Adapun manfaat penting dari uang pajak yang diterima negara menurut Indra Ismawan (2000) adalah:

1. Sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dalam APBN, dalam sisi penerimaan, dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Sebagai alat pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan keadilan sosial, dibutuhkan instrumen-instrumen yang menjamin pemerataan sosial ekonomi. Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan dilakukan dengan menerapkan tarif

pajak progresif. Secara *de facto* tarif pajak progresif hanya bisa efektif sebagai instrumen pemerataan bila dana yang dikumpulkan kemudian dialokasikan untuk kepentingan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Pengalokasian pajak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan kesehatan bagi instrumen pemerintah.

3. Sebagai alat untuk mendorong investasi. Apabila realisasi pajak dalam APBN lebih besar dari anggaran pengeluaran rutin, maka ada saldo yang dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Investasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui proses pelipatan (*multiplying effect*). Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, saldo tersebut di atas bisa dialokasikan langsung untuk menambah proyek-proyek pembangunan. Tetapi dapat juga saldo anggaran disimpan dulu dalam tabungan pemerintah (*public saving*) untuk dialokasikan pada periode berikutnya.

Meningkatkan pendapatan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah secara vertikal yaitu pemerintah dapat mengubah tarif pajak menjadi lebih tinggi, dan secara horizontal yaitu pemerintah mungkin melakukan perluasan basis pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal *self assesment* dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya secara berkala ke kantor peyanaan pajak setempat. Agar sistem ini berjalan secara efektif, maka keterbukaan dalam pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang penting.

Isu atau masalah penting lainnya adalah bagaimana mengamankan penerimaan negara ini dengan cara meningkatkan kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya dengan benar atau paling tidak memadai. Satu hal yang sering mempengaruhi penghitungan pajaknya adalah sikap atau persepsi wajib pajak. Seperti diketahui bahwa pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Walaupun semua sependapat bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipikul bersama oleh semua warga negara demi kepentingan negara tetapi pada kenyataannya tidak semua wajib pajak dapat menerima jumlah beban yang ditimpakan kepadanya. Sehingga timbul kecenderungan untuk mengalihkan atau mengurangi jumlah beban tersebut, baik

dengan cara legal maupun dengan cara melakukan usaha yang bertentangan dengan hukum pajak yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung, yang pada dasarnya merupakan pajak dimana bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Berdasarkan wewenang pemungutannya Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak pusat/pajak negara yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan subjek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dilakukan di dalam negeri dalam bentuk penyerahan, maupun dari luar negeri dalam bentuk impor. Termasuk di dalamnya adalah penyerahan terhadap buku-buku yang ikut menunjang kecerdasan suatu bangsa.

Sejarah telah mencatat bahwa pengembangan peradaban suatu bangsa banyak ditentukan oleh sejauh mana masyarakat bangsa tersebut mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyerap informasi serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat bangsa pada umumnya dan peserta didik di sekolah pada khususnya adalah buku. Dengan demikian, buku harus mampu menghimpun informasi yang bermutu yang disajikan dengan baik dan benar diketahui dan dikembangkan oleh pembacanya. Meskipun dewasa ini teknologi elektronika berkembang sangat pesat sehingga muncul media bacaan yang bersifat elektronik, namun demikian diakui buku dalam hal ini buku pelajaran umum tetap bertahan sebagai salah satu media yang efektif dalam rangka proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat bangsa, maka pemerintah memberikan pembebasan PPN terhadap penyerahan buku-buku pelajaran umum dengan tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk impor dan atau penyerahan buku-buku tertentu yang memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum.

Pusat Perbukuan merupakan salah satu instansi penting di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu Departemen di Bidang Perbukuan. Tugas dan Fungsi Pusat Perbukuan ialah melaksanakan pengembangan dan koordinasi kegiatan perbukuan serta pengendalian mutu buku, informasi dan teknologi perbukuan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam kaitannya dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan, dalam hal ini di Sub Bidang Pengendalian Mutu, mempunyai fungsi yang strategis dalam membantu penyediaan buku-buku pelajaran umum agar tersedia dengan harga yang murah dan memberikan pengaruh terhadap pemasukan kas negara dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya program kegiatan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan pemberian wewenang kepada Kepala Pusat Perbukuan atas nama Menteri Pendidikan Nasional.

Berpengaruh terhadap pemasukan kas negara karena kehati-hatian dan ketelitian dalam penelaahan yang dilakukan oleh Tim Penelaah Pusat Perbukuan akan menentukan apakah buku yang dimintakan rekomendasi berkategori pelajaran umum atau bukan. Hal ini mengingat pemohon rekomendasi berasal dari orang atau badan hukum yang melakukan impor buku atau orang atau badan hukum yang menerima penyerahan buku dalam negeri, termasuk pemberian rekomendasi buku-buku terbitan swasta yang bergerak dalam bidang bisnis maupun dari institusi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan.

Kehati-hatian dalam pemberian surat rekomendasi selain dilakukan dalam proses penelaahan diwujudkan juga dengan adanya pengendalian internal dari Pusat Perbukuan sendiri dari awal adanya permohonan rekomendasi sampai diterbitkannya surat rekomendasi. Sehingga akan dapat menghindari proses penyelewengan pajak dari setiap pemohon dengan cara legal maupun dengan cara melakukan usaha yang bertentangan dengan hukum pajak yang berlaku serta proses penelaahan berlangsung efektif dan efisien.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam karya akhir ini adalah:

- 1) Bagaimana analisis terhadap pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal dalam pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga tercapai kegiatan yang efektif dan efisien.
- 3) Bagaimana solusi yang diberikan atas temuan analisis tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu meluas dan tidak terarah pada tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

- 1) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya untuk buku-buku yang berkategori buku pelajaran umum.
- 2) Pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dianalisis pada tahun 2003 sampai dengan Juni 2008 di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.
- 3) Analisis dilakukan pada tahap dari pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi sampai dengan diterbitkannya surat rekomendasi oleh Kepala Pusat Perbukuan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disampaikan tujuan penelitian yang hendak dicapai:

- Untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas

Jakarta pada tahun 2003 sampai dengan Juni 2008 yang sudah dilaksanakan selama ini.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

- 1) Bagi Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
 - a. Evaluasi dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi/pengesahan sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.
 - b. Dapat dijadikan masukan dalam memperbaiki Sistem Pengendalian Internal dalam kegiatan memberikan rekomendasi/pengesahan sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di subbid Pengendalian Mutu Buku Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.
- 2) Bagi Ilmu Pengetahuan
Dapat dijadikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang sistem pengendalian internal dan perpajakan khususnya dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk buku pelajaran umum..

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya akhir ini adalah metode kualitatif deskriptif melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan yang diharapkan, penulis melakukan penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan mengambil data baik berupa teori maupun data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kemudian melakukan analisis berdasarkan teori dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi yakni dengan mencari, memilah dan mengumpulkan dari berbagai sumber.

3. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui proses pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta, dan menggunakan data-data yang ada selama proses pemberian rekomendasi dari tahun 2003 sampai dengan Juni 2008.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan dalam karya akhir ini adalah:

Bab.I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab. II . Landasan Teori berisikan tentang landasan teori yang dipakai dalam melakukan penelitian. Landasan teori tersebut diambil dari referensi-referensi yang relevan dengan topik penelitian.

Bab.III. Gambaran Umum Objek Penelitian menyajikan informasi berkenaan dengan profil Pusat Perbukuan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pusat Perbukuan.

Bab. IV. Analisa dan Pembahasan merupakan penjabaran tentang data yang menjadi materi untuk dianalisis dalam pembahasan, serta pembahasan yang merupakan analisis secara mendalam sampai pada penjelasan masalah.

Bab. V. Kesimpulan dan Saran berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi karya akhir dan saran-saran perbaikan yang dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*)

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*)

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005) *Value Added Tax* pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1954. Dengan berbagai kelebihannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diadopsi oleh banyak negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua faktor produksi dan distribusi. Dimana nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.

Pengertian *Value Added* (nilai tambah) menurut Tait Allan.T. (1991) adalah sebagai berikut:

“Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hardresser, famer, race horse trainer or circus owner) adds ti his raw material or purchases (orther that labour) before selling the new or improved product or service. That is, inputs (the raw material, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and whwn the final goods and services or sold, some profit are left. So, value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the substractive side (output minus inputs).”

Berdasarkan definisi di atas, maka diketahui bahwa nilai tambah dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta dari sisi selisih output dikurangi input. Oleh karena yang menjadi dasar pengenaan pajak ini adalah nilai tambah (*Value Added*). Definisi Pajak Pertambahan Nilai (VAT) menurut Smith, dkk seperti yang dikutip Rosdiana dan Tarigan (2005) adalah sebagai berikut:

“The VAT is a fax on the value added by a firm to its products in the course, of its operation. Value added can be viewed either as the difference between firm's sales and its purchase during an accounting period, or as the sum of its wage, profits, rent, interest and other paymets not subject to the fax during that period.”

Dari definisi di atas merupakan pajak atas pertambahan nilai terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan selama kegiatan operasinya. Pertambahan nilai dapat dilihat baik sebagai selisih antara penjualan dan pembelian yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi, ataupun sebagai pejumlahan atas upah, keuntungan, sewa, bunga dan pembayaran lainnya yang bukan merupakan objek pajak selama periode akuntansi yang bersangkutan.

Dengan demikian PPN dapat diartikan juga sebagai suatu jenis pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa yang ditransaksikan. Dari pengertian tersebut tampak bahwa nilai tambah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam analisa dan pembahasan tentang PPN (Tait Allan.T., 1998). Dengan mengenakan PPN atas nilai tambah (*added value*) dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Jadi yang dimaksud dengan nilai tambah (*added value*) adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan oleh pengusaha. Secara sederhana nilai tambah di bidang perdagangan dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan. Untuk lebih jelasnya diterangkan dengan contoh sebagai berikut:

Pembelian:	
Bahan Baku	2.000
Bahan Pembantu	1.000
Suku Cadang dll	1.000
Jumlah	4.000
Biaya:	
Penyusutan	250
Bunga Modal	750
Gaji/Upah	1.000
Biaya Manajemen	750
Laba Usaha	750
Jumlah	3.500
Harga Jual	7.500

Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa nilai tambah barang hasil produksi sebesar 3.500 identik dengan selisih antara harga jual sebesar 7.500 dengan harga pembelian bahan baku/pembantu dan sarana produksi lainnya sebesar 4.000.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PPN ini termasuk jenis pajak tidak langsung yang memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak mesti yang menanggung beban pajaknya dan yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian yang dikenakan untuk memungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang/jasa sampai konsumen.

Berdasarkan ketentuan, semua barang dan jasa pada hakikatnya adalah barang kena PPN kecuali ada beberapa jenis barang yang dikecualikan berdasarkan UU PPN. Ada juga beberapa jenis barang yang karena sifat strategisnya, mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Namun demikian, dalam hampir sebagian besar jenis barang yang kita konsumsi sehari-hari sudah terkandung unsur PPN yang besarnya 10% dari harga jual.

Prinsip yang penting untuk diketahui dalam PPN ini adalah bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang/jasa di dalam negeri. Dengan prinsip ini, maka barang yang dijual ke luar negeri harus dikeluarkan PPNnya sehingga banyak eksportir biasanya mengajukan restitusi PPN karena hal ini. Dengan prinsip ini juga, setiap barang/jasa yang masuk ke dalam negeri harus dikenakan PPN.

Untuk kegiatan impor, Ditjen Bea Cukai bertugas untuk memastikan importir telah membayar PPNnya. Jika atas penjualan barang/jasa di dalam negeri, maka ditunjuk pengusaha, baik sebagai badan atau orang pribadi, sebagai pemungut PPN ketika melakukan transaksi penjualan. Pengusaha yang ditunjuk ini selanjutnya disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun demikian, tidak semua pengusaha ini diharuskan menjadi PKP, ada batasan sebagai pengusaha kecil yang tidak diharuskan menjadi PKP. Ketika PKP memungut PPN dari pembelinya, PKP harus membuat bukti pungutan PPN yang disebut Faktur Pajak.

Bagi penjual, PPN yang dipungut dari pembeli akan menjadi PPN Keluaran (*output tax*). Bagi pembeli, PPN yang dibayarkan kepada penjual akan menjadi PPN masukan (*input tax*). Pada setiap akhir bulan PKP akan memperhitungkan berapa PPN Keluaran dibandingkan dengan PPN Masukannya. Jika PPN Keluaran lebih besar, maka selisihnya harus disetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 15 akhir bulan berikutnya. Jika sebaliknya PPN

Masukannya yang lebih besar, maka kelebihan bayar PPN ini bisa dikompensasikan dengan bulan berikutnya atau minta dikembalikan (*restitusi*). Sarana untuk hitung-hitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran ini dinamakan SPT Masa PPN dengan kode formulir 1107. Pelaporan SPT Masa PPN paling lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

2.1.2 Karakteristik PPN

Dengan memperhatikan semua uraian tentang PPN di atas maka dapat dikemukakan mengenai karakteristik PPN yaitu sebagai berikut:

1) PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Hal tersebut memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu bila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, administrasi pajak (*fiskus*) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual barang kena pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

2) Pajak Objektif

Yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif yang dinamakan *tatbestand*, yaitu suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan Obyek Pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah pada saat diketahui adanya *tatbestand* tersebut. Sedangkan Subyek Pajaknya tidak ikut menentukan terkena/tidaknya PPN. Apabila telah diketahui adanya suatu *tatbestand*, maka sudah timbul kewajiban pajaknya.

3) PPN merupakan *multistage tax*

Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi

objek PPN dari tingkat pabrikan (*manufacture*) sampai pedagang besar dan pedagang eceran (*retailer*) dikenakan PPN. Misalnya: pabrik benang menyerahkan benang ke pabrik tekstil, pabrik tekstil menyerahkan garmen ke pedagang besar, pedagang besar menyerahkan garmen ke pedagang eceran, pedagang eceran menyerahkan garmen ke konsumen.

Dari contoh di atas maka terlihat bahwa setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi dikenakan PPN. Demikian seterusnya sampai kepada sasaran akhir pengenaan PPN yaitu konsumen.

4) PPN merupakan Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsumsi di luar negeri, maka atas barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Demikian juga untuk Barang Kena Pajak yang diekspor ke luar negeri tidak akan dikenakan PPN.

5) Pemungutan PPN menggunakan faktur pajak.

Untuk menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membuat faktur pajak sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan faktur pajak ini akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor ke kas negara. Sedangkan bagi pihak pembeli atau penerima jasa, atau importir faktur pajak yang diterima merupakan bukti pembayaran pajak.

6) PPN bersifat netral

Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor yaitu

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi maupun jasa.
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan yaitu prinsip tempat asal (*origin principle*) dan prinsip tempat tujuan (*destination principle*). Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sedangkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut di tempat barang atau jasa

dikonsumsi. Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan PPN dalam perdagangan internasional. Agar daya saing komoditi Indonesia dengan produk domestik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia, maka terhadap komoditi ekspor dikenakan PPN dengan tarif 0%. Oleh karena itu dengan menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yang dimodifikasi dalam bentuk perlakuan khusus terhadap komoditi ekspor maka PPN netral dalam perdagangan internasional.

7) PPN tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja, sehingga pengusaha diberi hak untuk memperoleh kembali PPN yang dibayar atas perolehan bahan baku/pembantu atau barang modalnya.

2.1.3 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Definisi Pengusaha menurut UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983 pasal 1 ayat 14 adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, paling tidak akan melakukan salah satu dari kegiatan berikut:

- 1) Menghasilkan barang
- 2) Mengimpor barang
- 3) Mengekspor barang
- 4) Melakukan usaha perdagangan
- 5) Memanfaatkan usaha perdagangan
- 6) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- 7) Melakukan usaha jasa, atau
- 8) Memanfaatkan jasa dari Luar Daerah Pabean

Sedangkan definisi Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kecil (UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, pasal 1 ayat 15).

Mekanisme pemenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan PPN pada setiap transaksi yang terutang PPN. Perhitungan pembayaran dan pelaporan PPN, setiap bulannya harus dilakukan oleh PKP.

Dengan demikian setiap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan, antara lain: melaporkan usahanya, memungut pajak yang terutang, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang, serta melaporkan penghitungan pajak (UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, Penjelasan Pasal 3A).

2.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Barang atau jasa sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi:

- 1) Barang Kena Pajak
- 2) Jasa Kena Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2,3 UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Yang dimaksudkan dengan barang berwujud adalah aktiva tetap, seperti kendaraan, mesin dan juga berupa persediaan bahan baku, maupun barang jadi serta masih banyak lainnya, sedangkan barang Kena Pajak tidak berwujud diantaranya seperti Franchise, Lisensi, Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan berbagai hak-hak lainnya.

Menurut penjelasan pasal 4 UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, barang yang merupakan Objek Pajak PPN atau yang akan dikenakan PPN harus memenuhi persyaratan seperti barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam

Daerah Pabean, serta Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

Dengan demikian pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak menurut asal barang tersebut didapat, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean
- 2) Impor Barang Kena Pajak
- 3) Pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean
- 4) Ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Menurut pasal 1 angka 5,6,7 UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Selanjutnya yang dimaksud dengan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut asal barang tersebut terutang PPN, dapat dibedakan menjadi Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Menurut pasal 1 angka 1 UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sehingga yang merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan oleh perseorangan maupun badan dari luar negeri, yang memberikan jasa di daerah pabean, seperti jasa konsultan, jasa quality control, dan banyak jenis jasa lainnya (Djoko Mulyono, 2008).

Dengan demikian berbagai kegiatan penyerahan Jasa pada kegiatan tertentu dikenakan PPN antara lain adalah kegiatan seperti :

- 1) Jasa Pada Perbankan
- 2) Jasa Acara Televisi
- 3) Jasa Penggilingan Gabah
- 4) Jasa Pada Perhotelan
- 5) Jasa Pelabuhan Kapal Pelayaran Internasional.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan objek pajak PPN dikenakan atas (UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun 1983, Bab III Pasal 4):

- 1) penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 2) impor Barang kena pajak
- 3) penyerahan Jasa Kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- 4) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar daerah pabean di dalam Daerah pabean;
- 5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean; atau
- 6) ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

2.1.5 Tarif dan Penghitungan PPN

Menurut Djoko Mulyono (2008) Tarif PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari dasar Pengenaan pajak dikalikan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi seperti berikut:

- 1) Tarif Umum, tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa kena pajak secara umum yaitu sebesar 10% pasal 7 catatan: Pasal 7 UU PPh ayat (1) tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Ekspor, Tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang kena pajak maupun Jasa Kena Pajak pada ekspor adalah 0 % bukan dengan dibebaskan PPN, sehingga pajak masukannya dapat dikreditkan. Catatan: Pasal 7 UU PPh ayat (2) Pajak pertambahan Nilai atas ekspor Barang kena pajak adalah 0% (nol persen). Penjelasan pasal 7 UU PPh ayat (2) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di Dalam daerah Pabean . Oleh

karena itu, Barang kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di Luar daerah opabean , dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekpor tetap dapat dikreditkan.

- 3) Tarif minimal dan maksimal, tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15% , tergantung kebutuhan dasar dari pemerintah. Perubahan tarif ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan penyusunan RAPBN.
- 4) Tarif Efektif, tarif efektif dari PPN dikenakan pada berbagai BKP tertentu, seperti industri rokok.

2.1.6 Restitusi PPN

Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan Pajak Masukan yang disebabkan oleh adanya kelebihan pembayaran pajak. Restitusi PPN merupakan serangkaian kegiatan yang panjang dengan membebaskan berbagai pihak seperti Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pembeli dan penjual barang atau jasa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Agen dan Perusahaan Pelayaran dan Perbankan. Restitusi merupakan konsekuensi kebijakan penerapan PPN, yaitu apabila dalam suatu masa pajak Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK) yang harus dipungut. Sesuai dengan hakikat PPN yaitu pajak atas nilai tambah, selama pengusaha masih melakukan adanya nilai tambah, maka pengambilan pajak/restitusi hanya dapat terjadi antara lain karena beberapa hal sebagai berikut (Untung Sukardji, 2005):

- 1) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN hampir selalu mengakibatkan lebih bayar karena PKP yang bersangkutan belum sempat mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar dalam masa pajak yang sama, PPN terutang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh pemungut PPN.

- 2) Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari bantuan LN baik berupa hibah maupun pinjaman.

Kelebihan Pajak Masukan ini adalah sebagai konsekuensi pemberian fasilitas PPN dan PPhBM yang terutang tidak dipungut atas penyerahan BKP dan/atau JKP dan atau impor BKP dalam rangka proyek milik pemerintah yang dibiayai dengan dana yang bersal dari LN.

- 3) Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada *Enterport* Produksi untuk Tujuan Ekspor (*EPTE*).

PKP yang menyerahkan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada Pengusaha yang memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai EPTE, mendapat fasilitas PPN yang terutang Tidak dipungut.

- 4) Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET).

Perlakuan PPN atas ekspor dipercepat sedemikian rupa sehingga tarif 0% dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak yang akan diekspor.

- 5) Selain kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi kesalahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

2.1.7 Mekanisme Pengkreditan PPN

Menurut Gunadi dkk, (1999) ada 2 (dua) macam mekanisme pengkreditan PPN yaitu:

- 1) Mekanisme pengkreditan secara tidak langsung (*indirect*)

Yaitu mekanisme pengkreditan PPN dimana PPN Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dapat dikreditkan tanpa

perlu mengaitkannya dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Jadi barang-barang yang masuk ke persediaan (*inventory*) dapat juga dikreditkan. Sebagai contoh kita membeli barang Rp.100.000.000; PPN Masukannya Rp.10.000.000; atas barang tersebut hanya digunakan Rp.50.000.000; dalam proses produksi, sedangkan Rp. 50.000.000; sisanya merupakan persediaan (*inventory*). Dalam mekanisme ini, maka pada saat menghitung PPN terhutang seluruh PPN Masukan sebesar Rp.10.000.000; dapat dikreditkan seluruhnya.

2) Mekanisme Pengkreditan secara langsung (*direct*)

Yaitu mekanisme pengkreditan PPN Masukan (PM) dikaitkan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Jadi seperti yang ada dalam contoh di atas (*indirect*) nilai Rp.50.000.000; yang menjadi *inventory* tidak dapat dikreditkan karena hanya Rp.50.000.000; saja yang merupakan harga pokok penjualan dari barang yang dijual. Hal tersebut akan lebih jelas jika dicontohkan sebagai berikut:

PT.A mempunyai peredaran usaha Rp.2.000.000.000; maka PPN Keluaran (PK) adalah Rp.200.000.000;

Indirect PPN:

PK	Rp.200.000.000;
PM	Rp. 10.000.000;
PPN kurang bayar	Rp.190.000.000;

Direct PPN:

PK	Rp.200.000.000;
PM	Rp. 5.000.000;
PPN kurang bayar	Rp.195.000.000;

2.1.8 Pembebasan PPN

Dalam rangka memberikan fasilitasi ke masyarakat, maka penggolongan PPN menurut Pasal 4A UU PPN, dapat dikelompokkan menjadi PPN tidak dikenakan, tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah.

1) **PPN tidak dikenakan** terhadap Barang dan Jasa Tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Sedangkan penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- d. Jasa di bidang keagamaan;
- e. Jasa di bidang pendidikan;
- f. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- g. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- h. Jasa di bidang tenaga kerja;
- i. Jasa di bidang perhotelan;
- j. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2) **PPN tidak dipungut**, atas kegiatan di kawasan /tempat tertentu di dalam daerah Pabean , meliputi:

- a. Penyerahan BKP/JKP tertentu
- b. Impor Barang Kena pajak tertentu
- c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- d. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean dalam daerah pabean

3) **PPN Dibebaskan**, terdiri atas:

- a. Barang Kena Pajak Dibebaskan, meliputi Buku pelajaran Umum, Kitab suci dan Buku pelajaran Agama, Barang kebutuhan pokok, BKP Strategis.
- b. Jasa Kena Pajak Dibebaskan, meliputi: Jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran Niaga nasional atau perusahaan penangkapan Ikan Nasional, Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional, Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT.Kai, Jasa yang diserahkan kontraktor untuk pemborongan Rumah Sederhana, Rumah Sangat sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pandok Bara, asrama mahasiswa/Pelajar, serta perumahan lainnya., Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, Jasa yang diserahkan oleh TNI dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara republik Indonesia.

Dari kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan penjelasan pasal 16B UU PPN ayat (1) tujuan dan maksud diberikannya kemudahan/pembebasan dalam bidang perpajakan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

2.2. Pengertian Buku Pelajaran Umum

Yang dimaksud dengan buku-buku pelajaran umum menurut PP RI No. 38 Tahun 2003 adalah buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan keputakaan yang dipergunakan oleh Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Luar Biasa, Perguruan Tinggi/Universitas, termasuk Sekolah Kejuruan,

Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Keagamaan mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang mendukung kurikulum sekolah.

Sedangkan pengertian dasar atas buku-buku pelajaran pokok, penunjang, dan kepastakaan menurut Kep. Dirjen pendidikan Dasar dan Menengah No. 042/C/I/Kep/79 sebagai berikut:

- 1) Buku Pelajaran Pokok adalah buku-buku teks pelajaran yang berisi bahan pelajaran suatu bidang studi yang digunakan sebagai buku pokok dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah baik bagi siswa maupun guru.
- 2) Buku Penunjang atau Buku Pelengkap atau Buku Teks Pengayaan adalah buku-buku yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan sebagai bahan pengayaan bagi buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa maupun guru di sekolah.
- 3) Buku Kepustakaan adalah buku-buku yang dapat dikategorikan ke dalam buku bacaan baik yang menunjang kurikulum (Standar Isi dan standar Kompetensi Lulusan) maupun bersifat umum, buku sumber yang dapat memberikan kejelasan tambahan mengenai suatu bidang ilmu maupun keterampilan, dan bacaan lainnya yang penerbitannya bersifat periodik.

2.3 Kategori Buku yang Tidak Termasuk Buku pelajaran Umum

Ada beberapa jenis buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran umum menurut Pasal 1 Ayat (2) Kepmenkeu 353/KMK.03/2001 yaitu sebagai berikut:

- 1) buku hiburan,
- 2) buku roman populer,
- 3) buku sulap,
- 4) buku iklan,
- 5) buku promosi suatu usaha,
- 6) buku katalog di luar keperluan pendidikan,
- 7) buku karikatur,
- 8) buku horoskop,
- 9) buku horor,

- 10) buku komik, dan
- 11) buku reproduksi lukisan.

Buku-Buku yang tidak termasuk ke dalam buku pelajaran umum dapat dikategorikan sebagai buku pelajaran umum apabila buku-buku tersebut telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 1 Ayat (3) Kepmenkeu 353/KMK.03/2001).

2.4 Pengendalian Internal/*Internal Control*

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)*, *Internal Control* atau pengendalian Internal adalah Sistem, struktur, atau proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil-personil lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan-tujuan pengendalian di dalam kategori-kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan pelaporan keuangan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, kegiatan operasi yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diperlukan Struktur Pengendalian Internal yang baik. Komponen-komponen Struktur Pengendalian Internal adalah sebagai berikut (Graham, L : 2007):

- 1) *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian)
- 2) *Risk Assessment* (Penilaian Resiko)
- 3) *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian)
- 4) *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi)
- 5) *Monitoring*

Jika digambarkan maka Struktur Pengendalian Internal dapat dilihat seperti pada gambar 1.

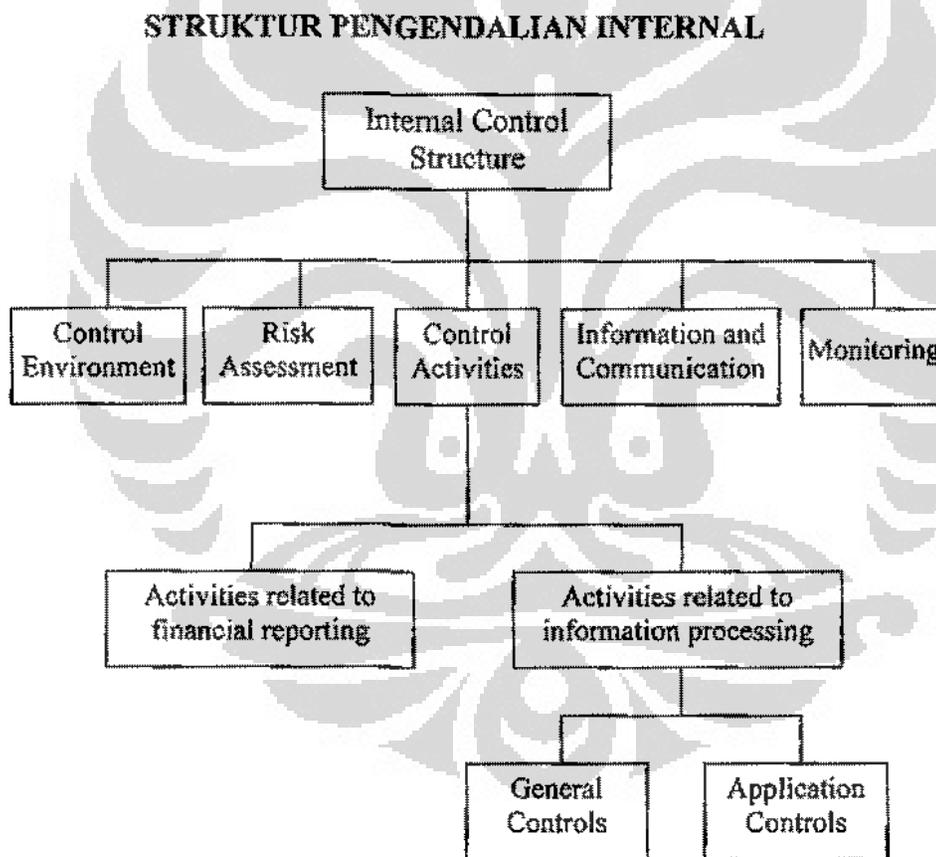
Penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

1) **Komponen Lingkungan Pengendalian/*Control Environment***

Komponen ini merupakan komponen yang paling penting dari semua komponen Struktur Pengendalian Internal. *Control Environment* yang jelek sering mengindikasikan kelemahan dari komponen-komponen lainnya. Selain itu *Control Environment* juga mencerminkan tingkat kesadaran dari pimpinan

organisasi tentang Pengendalian Internal. *Control Environment* terbagi lagi menjadi beberapa sub komponen sebagai berikut (Deddy Nordiawan:2007):

- a. Filosofi manajemen dan gaya operasi
- b. Integritas dan nilai etis.
- c. Komitmen terhadap kompetensi.
- d. Dewan direksi atau komite audit.
- e. Struktur organisasi.
- f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.
- g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.



Gambar 1. Struktur Pengendalian Internal

Sumber: Wilkinson et al., 2000.

2) **Komponen Penilaian Resiko/*Risk Assessment***

Semua organisasi pasti menghadapi risiko baik internal maupun eksternal. *Risk Assessment* terdiri dari sub komponen sebagai berikut (Deddy Nordiawan:2007):

- a. Semua organisasi, tanpa memandang ukuran, struktur, atau industri, menghadapi risiko internal dan eksternal yang signifikan.
- b. Komponen penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal terdiri dari identifikasi dan analisa risiko yang relevan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan secara keseluruhan dan pencapaian tujuan unit organisasi dan pembuatan suatu rencana untuk menentukan bagaimana mengelola risiko tersebut.
- c. Manajemen tingkat atas harus ikut serta langsung dalam penilaian risiko.

3) **Komponen Aktivitas Pengendalian/*Control Activities***

Sebuah organisasi harus menyusun kebijakan dan prosedur aktivitas pengendalian untuk memastikan para staf melakukan apa yang diarahkan oleh pimpinan. Sub-sub komponennya adalah sebagai berikut (Deddy Nordiawan : 2007) :

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah: Memberitahukan rancangan dan penggunaan dokumen yang *prenumbered* dan pencatatan, pemisahan tugas, otorisasi transaksi yang sesuai, pengamanan dan pengukuran keamanan yang cukup, pemeriksaan independen terhadap kinerja, penilaian jumlah yang dicatat, review kinerja.
Review Kinerja ini meliputi: membandingkan anggaran dengan nilai aktual, mengaitkan sekumpulan data yang berbeda – operasi atau keuangan satu sama lain, bersamaan dengan analisa hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, mereview kinerja fungsional
- b. Aktivitas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi: pengendalian umum, pengendalian aplikasi.

4) **Komponen Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication***

Data harus bisa diolah secara benar oleh sistem informasi organisasi sehingga menjadi informasi yang handal, akurat, dan tepat waktu. Selain itu informasi-informasi yang dihasilkan oleh system harus dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi-informasi tersebut. Sistem penyampaiannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pengguna informasi (Deddy Nordiawan:2007) :

- a. Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan sehingga personil yang bersangkutan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka.
- b. *Subobjectives* di bawah ini memastikan bahwa metode dan pencatatan sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan:
- c. Semua transaksi yang dimasukkan untuk diproses merupakan transaksi yang valid dan telah disetujui.
- d. Semua transaksi yang valid dapat diketahui dan dimasukkan untuk diproses tepat waktu dan dalam detail yang memadai untuk memungkinkan klasifikasi transaksi yang baik.
- e. Data input dari semua transaksi yang dimasukkan merupakan data yang lengkap dan akurat, dengan transaksi yang dituliskan dalam *monetary terms* yang sesuai.
- f. Semua transaksi yang dimasukkan diproses untuk memperbaharui semua catatan yang terpengaruh.
- g. Semua output yang diperlukan disiapkan berdasarkan aturan yang sesuai untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan.
- h. Semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai.
- i. Semua informasi harus dikomunikasikan dengan efektif ke seluruh organisasi ke semua personil yang tepat.
- j. Informasi dapat juga dikomunikasikan secara langsung, dengan grafik, dan secara elektronik.

5) **Komponen Pengawasan/*Monitoring***

Pengawasan dalam hal ini adalah berkaitan dengan penilaian efektifitas struktur pengendalian internal secara periodik dan terus menerus untuk melihat

apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai sumber meliputi studi atas struktur pengendalian internal, laporan audit internal, laporan penyimpangan, dan lain-lain (Deddy Nordiawan:2007).



BAB 3

GAMBARAN UMUM PUSAT PERBUKUAN DEPDIKNAS JAKARTA

3.1. Sejarah Pusat Perbukuan

3.1.1 Latar Belakang Pendirian Pusat Perbukuan

Pembentukan Pusat Perbukuan dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya sebuah lembaga, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Depdikbud) saat itu, yang khusus menangani tugas berat dalam pengadaan buku pelajaran bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pusat Perbukuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1987, dengan kedudukan, tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/O/1987. Dalam keputusan Mendikbud tadi disebutkan bahwa Pusat Perbukuan adalah pelaksana tugas di bidang perbukuan yang berada langsung di bawah Mendikbud. Namun dalam Kepres No. 4 tahun 1987 tadi, terdapat paling tidak tiga pusat lain yang terlibat dalam urusan perbukuan, yaitu Pusat Pembinaan Perpustakaan, Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Grafika. Keadaan ini mendorong diterbitkannya Surat Edaran Mendikbud No. 57/MPK/87 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa penanganan masalah perbukuan di lingkungan Depdikbud berada dalam satu tangan, yaitu Pusat Perbukuan, dan seluruh kegiatan perbukuan yang dilakukan satuan kerja di luar Pusat Perbukuan diharapkan berkoordinasi dan dikonsultasikan dengan Pusat Perbukuan. Tugas koordinasi kegiatan perbukuan Pusat Perbukuan ini kemudian semakin ditegaskan melalui Kepmendikbud No. 0787/O/1987, dimana tugas koordinasi tersebut dapat berbentuk pengarahan, pemberian pedoman/petunjuk, konsultasi atau laporan terhadap kegiatan penulisan naskah, penerjemahan, penilaian, seleksi, produksi, pengadaan dan distribusi buku.

3.1.2 Restrukturisasi Pusat Perbukuan

Sejak berdirinya Pusat Perbukuan paling tidak mengalami tiga kali restrukturisasi. Pertama pada tahun 2000 (Kepmendiknas No. 010/O/2000) Pusat

Perbukuan mengalami peleburan struktur organisasi, dari semula terdapat empat bidang teknis diperkecil menjadi dua bidang teknis. Dua bidang Pengembangan Naskah (ilmu sosial dan eksakta) digabung menjadi Bidang Pengembangan naskah, sedangkan Bidang Pengadaan dan Bidang Distribusi digabung menjadi satu. Selain itu di Pusat Perbukuan telah dibentuk kelompok tenaga fungsional.

Restrukturisasi kedua terjadi tidak lama kemudian yaitu pada tahun 2001 dan cukup signifikan (Kepmendiknas No. 175/O/2001). Bidang Pengembangan Naskah diberi beban tambahan yaitu pengendalian mutu dan berubah menjadi Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku. Sedangkan Bidang Pengadaan dihapus, diganti dengan bidang Teknologi dan Informasi Perbukuan. Pusat Perbukuan mendapat fungsi baru yang cukup penting adalah mengembangkan teknologi perbukuan. Selain itu dibentuk kelompok jabatan baru setingkat eselon IV, yaitu Kasubbidang.

Restrukturisasi terakhir dilakukan pada tahun 2005 (Peraturan Mendiknas No. 23 Tahun 2005), dimana fungsi pengembangan teknologi dihilangkan dan hanya mengelola informasi perbukuan, Berdasarkan Permendiknas tersebut, Pusat Perbukuan adalah unsur pelaksana tugas bidang perbukuan di Departemen Pendidikan Nasional. Pusat ini dipimpin oleh seorang kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional.

3.1.3 Pusat Perbukuan dan Lembaga Lain

Selama 20 tahun berkiprah Pusat Perbukuan, paling tidak terdapat tiga lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam kaitan pengembangan perbukuan nasional. Ketiga lembaga ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi dan kinerja Pusat Perbukuan. Pertama adalah Badan Pertimbangan Pengembangan Perbukuan Nasional (BPPBN), yang dibentuk pada tahun 1978 melalui Keppres No. 5 Tahun 1978. BPPBN merupakan lembaga non struktural di lingkungan Depdikbud saat itu yang bertugas menelaah, menilai masalah perbukuan nasional dan memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan perbukuan. Beberapa RUU telah dihasilkan oleh BPPBN, yaitu RUU Perbukuan, RUU Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan RUU Perpustakaan. Dua

RUU terakhir telah disahkan, masing-masing UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Terima Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan yang baru saja disahkan pada bulan Oktober 2007 yaitu UU No. 43 tentang Perpustakaan. Semula BPPBN bersekretariat di Pusat Pembinaan Perpustakaan, kemudian pada tahun 1992 dialihkan ke Pusat Perbukuan. Dua dasawarsa BPPBN telah banyak memberikan peran dalam perkembangan perbukuan nasional. Saat ini peran BPPBN tersebut dilanjutkan oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. Banyak rekomendasi BPPBN yang belum teralisasi dan menjadi tugas Pusat Perbukuan ke depan.

Lembaga kedua adalah Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, yang didirikan dengan PP No. 48 tahun 1985. Perum Balai Pustaka sangat berperan dalam pengadaan buku, terutama buku teks pelajaran, dan distribusinya. Terkait dengan penerbitan buku pelajaran, pada awalnya hak penerbitan diberikan hanya kepada Perum Balai Pustaka melalui Kepmendikbud No. 0689/M/1990 tentang hak penerbitan buku pelajaran dan buku bacaan hasil proyek di lingkungan Depdikbud. Selanjutnya melalui Kepmendikbud No. 044/U/1994, diberikan izin pelaksanaan kerjasama dengan swasta berkenaan dengan cetak ulang buku pelajaran yang diterbitkan oleh Perum Balai Pustaka.

Petunjuk pelaksanaannya lebih jauh diatur dalam Kep. Sejen Mendikbud No. 18617/A/R/1994. Selanjutnya peran swasta nasional semakin dilibatkan dengan pemberian izin penerbitan buku teks utama mata pelajaran tertentu yang tidak diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Pusat Perbukuan ditugaskan membentuk tim penilai dan seleksi buku teks utama dengan kewenangan menetapkan diberikan kepada Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada tahun 1996, melalui Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1996, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta agar dapat lebih berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Perum Balai Pustaka dialihkan bentuknya menjadi perusahaan Perseroan (PT. Balai Pustaka) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan demikian PT Balai Pustaka tidak lagi memiliki hak eksklusif dalam penerbitan naskah dan/atau buku teks pelajaran. Sedangkan keterlibatan pihak swasta dalam penerbitan buku-buku yang bukan buku pelajaran, hasil proyek di lingkungan Depdikbud, diatur dalam

Kepmendikbud No. 0208/P/1999., dimana penyerahan hak dilakukan oleh Pusat Perbukuan. Untuk itu Pusat Perbukuan membuat kelompok Kerja Tingkat Pusat yang menelaah, menyeleksi dan mengusulkan naskah yang layak diterbitkan (Kepkapusbuk 912b/11.1/U/1999).

Lembaga ketiga adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. BSNP merupakan lembaga mandiri, profesional dan bertugas mengembangkan, memantau dan melaporkan standarisasi pendidikan termasuk dalam hal ini mutu buku teks pelajaran. Merujuk pada Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, salah satu fungsi Pusat Perbukuan adalah pengendalian mutu buku pendidikan. Namun sejak disahkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kebijakan penilaian buku teks pelajaran yaitu menyangkut kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan dilaksanakan oleh BSNP maka tugas Pusat Perbukuan dalam pengendalian mutu buku pendidikan, dalam hal ini buku teks pelajaran, adalah sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.2. Profil Pusat Perbukuan

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional merupakan salah satu pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam menjalankan Tugas Pokoknya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005, tanggal 15 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas dan Permendiknas Nomor 27 tahun 2006 tentang Rincian Tugas Pokok Pusat Perbukuan, 19 Juli tanggal 2006 serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9/MPN.A4/ KP/2006 tanggal 14 Maret 2006, tentang pengangkatan Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional,

Secara umum Tugas Pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional adalah melaksanakan pengembangan, pengendalian mutu, pengelolaan informasi perbukuan, koordinasi

serta fasilitasi perbukuan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pusat Perbukuan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perbukuan;
- 2) Pengembangan naskah, penulisan, dan penerjemahan buku;
- 3) Pengendalian mutu buku pendidikan;
- 4) Pengelolaan informasi perbukuan;
- 5) Koordinasi dan fasilitas perbukuan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Visi:

Menjadikan lembaga yang terpercaya dalam menjamin buku pendidikan yang berkualitas, harga terjangkau, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Misi:

- 1) Mengembangkan standar mutu buku pendidikan
- 2) Melaksanakan pengendalian mutu buku pendidikan
- 3) pelayanan informasi perbukuan nasional
- 4) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perbukuan
- 5) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perbukuan

Pusat Perbukuan adalah unsur pelaksana Tugas Pokok tertentu Departemen di bidang perbukuan. Pusat dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Lingkup layanan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiataannya, terutama meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan perbukuan, pengendalian mutu perbukuan, dan layanan informasi perbukuan.

Beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan Pusat Perbukuan, antara lain berupa:

- 1) Penilaian buku teks pelajaran yang layak ajar (terstandar);
- 2) Penilaian buku nonteks pelajaran yang layak ajar (terstandar);
- 3) Pengalihan hak cipta buku teks pelajaran layak ajar (terstandar);
- 4) Sayembara penulisan naskah buku pengayaan;
- 5) Penelaahan buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 6) Penyusunan naskah model buku teks pelajaran;

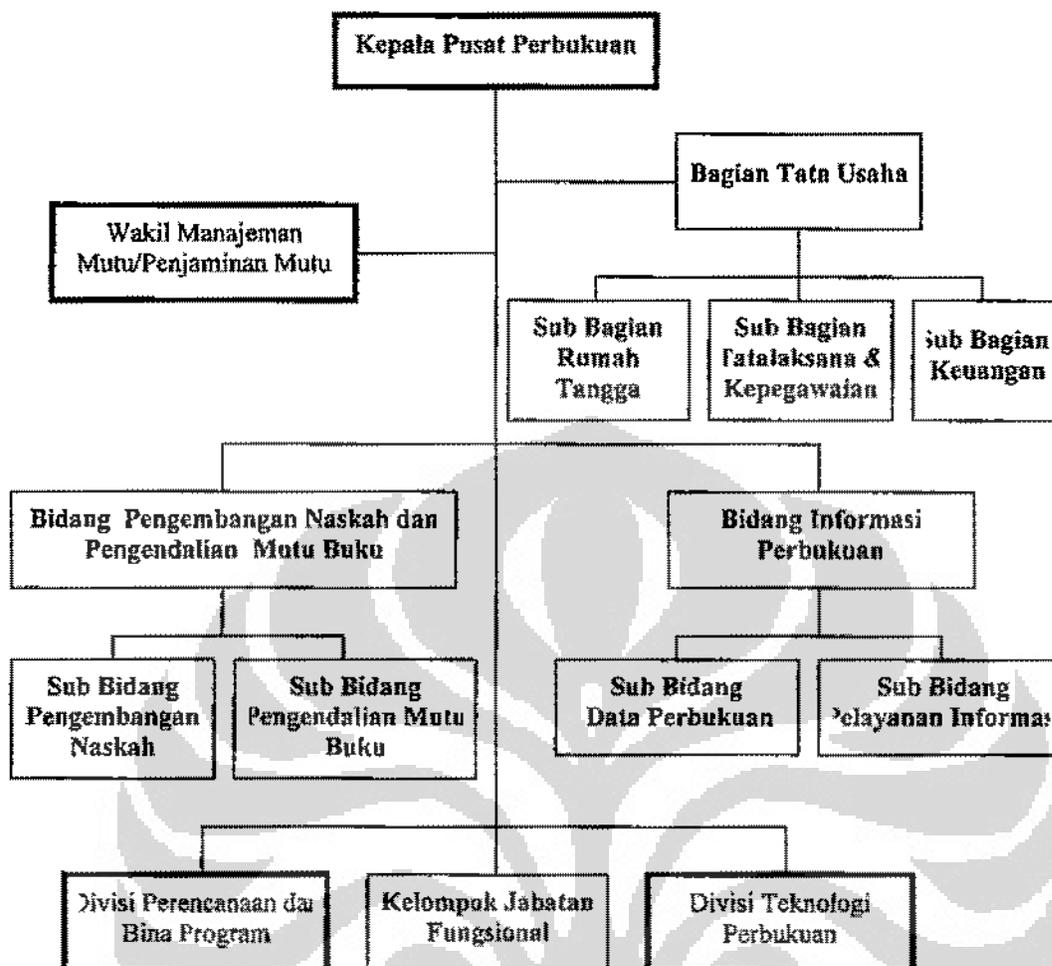
- 7) Pengembangan peta konsep;
- 8) Penyusunan naskah buku panduan pendidik;
- 9) Penerjemahan buku berbahasa asing;
- 10) Penyusunan rancangan undang-undang sistem perbukuan nasional;
- 11) Pengkajian keterbacaan buku teks pelajaran layak ajar hasil penilaian, dan pemanfaatan buku hasil sayembara;
- 12) Seminar pengembangan perbukuan;
- 13) Penyebarluasan informasi perbukuan;
- 14) Peningkatan sumber daya manusia pengelola perbukuan;
- 15) Fasilitasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan referensi (*buffer stock*).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan merupakan bentuk layanan kepada lembaga-lembaga unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, lembaga/dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, sekolah dan perguruan tinggi negeri/swasta, serta *stakeholder* perbukuan (penulis, penerbit, percetakan, toko buku, penerjemah, editor, ilustrator, dan desainer). Hal ini dimaksudkan agar layanan yang diberikan dapat meningkatkan mutu perbukuan.

3.3 Struktur Organisasi Pusat Perbukuan, Depdiknas, Jakarta

Struktur Organisasi Pusat Perbukuan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2005.

Berdasarkan Permendiknas No. 23 tahun 2005, pada Pusat Perbukuan terjadi perubahan fungsi dari perumusan kebijakan teknis di bidang perbukuan (Kepmendiknas No. 010/O/2000) diganti menjadi hanya penyiapan bahan perumusan kebijakan perbukuan. Fungsi perumusan kebijakan diserahkan kepada BSNP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Demikian pula fungsi pelaksanaan seleksi buku teks pelajaran, berdasarkan Permendiknas Nomor 11 tahun 2005, diserahkan ke BSNP.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Perbukuan

Sumber: Permendiknas No. 24 Tahun 2005

3.4 Tugas dan Fungsi Pusat Perbukuan

Pusat Perbukuan bertekad menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 agar menjadi lembaga perbukuan yang unggul, mampu mewujudkan visi dan misi dalam pengembangan, pengendalian mutu, pengelolaan informasi serta pelayanan yang prima dengan mengoptimalkan sumber daya di lingkungan Pusat Perbukuan. Untuk itu, seluruh karyawan Pusat Perbukuan akan selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan sesuai persyaratan pelanggan, peraturan yang berlaku, dan sistem manajemen mutu.

Dalam kegiatan sehari-hari, Pusat Perbukuan menerapkan *Core Value* "Percayakan Untuk Pengendalian Mutu Seluruh Buku Pendidikan Urusan Kami".

Dengan menetapkan dan mensahkan kebijakan mutu, Kepala Pusat Perbukuan memastikan bahwa kebijakan mutu:

- 1) telah sesuai dengan tujuan Pusat Perbukuan;
- 2) mencakup ikrar perlibatan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutunya;
- 3) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu;
- 4) dikomunikasikan dan dipahami oleh semua karyawan di Pusat Perbukuan dan;
- 5) ditinjau terus menerus agar tetap sesuai.

Sasaran Mutu disusun sebagai tolok ukur pencapaian produk Pusat Perbukuan. Sasaran Mutu ditetapkan berdasarkan kondisi objektif dan upaya menjamin buku pendidikan yang berkualitas, harga terjangkau, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pencapaian Sasaran Mutu Pusat perbukuan dilakukan mulai tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Berikut perincian sasaran Mutu Pusat Perbukuan.

a. Pengembangan Naskah

- 1) Tersedianya naskah model buku pelajaran sebanyak 15 naskah
- 2) Tersedianya naskah buku panduan pendidik sebanyak 4 naskah
- 3) Tersedianya naskah buku pengayaan pemenang hasil sayembara sebanyak 54 naskah
- 4) Tersedianya buku terjemahan bahasa asing hasil subsidi sebanyak 20 buku

b. Pengendalian Mutu Buku

- 1) Tersedianya buku nonteks pelajaran (pengayaan, kamus, panduan pendidik) terstandar sebanyak 300 buku
- 2) Tersedianya buku teks pelajaran terstandar sebanyak 21 mata pelajaran
- 3) Tersedianya buku teks pelajaran layak ajar hasil pembelian hak cipta sebanyak 160 judul buku.
- 4) Tersedianya buku hasil pemberian rekomendasi untuk pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 200 judul buku.

c. Layanan Informasi Perbukuan

Produk Informasi:

- 1) Penerbitan Bahan Informasi sebanyak 22.000 eksemplar
- 2) Sosialisasi Penilaian ke 33 provinsi

- 3) Sosialisasi pemanfaatan Buku di sekolah di 10 provinsi
- 4) Pengembangan data base perbukuan sebanyak 3 laporan
- 5) Seminar pemngembangan Perbukuan di 4 provinsi.

3.5 Kebijakan Penelaahan Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam kaitannya dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku mengadakan salah satu program kegiatan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari institusi pendidikan ataupun dari badan-badan lain (PT, CV) sejak tahun 2003.

Menurut PP No. 146 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4, Barang Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Kepmenkeu RI No. 353/KMK.03/2001 pasal 4 tentang batasan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menyatakan tentang kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berlaku untuk impor dan atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Selain itu, kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai juga berlaku untuk buku-buku yang tidak termasuk pengertian buku pelajaran umum setelah mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk (Kepmenkeu RI No. 353/KMK.03/2001 pasal 1 ayat 3).

Rekomendasi diperlukan untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai atas impor untuk buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (SE Dirjen Bea Cukai No. S-603/BC/2005) dan untuk penyerahan buku pelajaran umum (Rapat Pusat Perbukuan dengan Staf Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta staf Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 2 November 2006).

Untuk memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai tersebut diperlukan rekomendasi untuk buku-buku yang berkategori buku pelajaran umum dan pengesahan untuk buku-buku yang sebelumnya berkategori bukan buku pelajaran umum. Rekomendasi dan pengesahan diberikan dari Menteri Pendidikan

Nasional atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Pusat Perbukuan. Landasan hukum sebagai dasar kerja pemberian rekomendasi dan pengesahan buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN dapat dilihat dalam Peta Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan Buku pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN. Peta Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan Buku pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN terlampir.

Pusat Perbukuan akan menerbitkan rekomendasi dan pengesahan sebagai buku pelajaran umum berdasarkan penelaahan terhadap buku-buku yang dimohonkan untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, baik buku yang berasal dari impor maupun berasal dari penyerahan dalam negeri. Sebagai panduan agar proses pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum tepat sasaran, maka kerja dari Tim Penelaah buku didasarkan pada sebuah pedoman tentang pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.5.1 Sasaran

Mengingat buku-buku pelajaran umum merupakan sarana yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pada sisi yang lain keadaan keuangan negara juga perlu diperhatikan, penerapan kebijakan mengenai pengesahan buku pelajaran umum yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlu dilakukan secara hati-hati dan selektif. Kehati-hatian dan selektivitas tersebut diperlukan demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan terpeliharanya keadaan pemasukan keuangan negara.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sasaran yang akan dicapai melalui kegiatan pengesahan buku pelajaran umum ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya buku-buku berkategori palajaran umum yang dapat membantu dan menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Tersedianya buku-buku berkategori buku pelajaran umum yang atas impor dan atau penyerahannya layak diberikan pembebasan pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN).

- c. Mengupayakan terwujudnya harga buku berkategori pelajaran umum yang dapat terjangkau oleh masyarakat dengan tidak mengabaikan mutu buku dari berbagai aspeknya.
- d. Menggairahkan minat baca masyarakat dalam rangka menggalakkan kualitas penerbitan dan percetakan buku-buku impor berkategori pelajaran umum.

3.5.2 Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- 2) Sekretariat Pelaksana Pusat Perbukuan akan melakukan administrasi penerimaan surat permohonan sesuai dengan ketentuan tata administrasi yang berlaku di Pusat Perbukuan yakni sebagai berikut.
 - (1) Pemeriksaan kesesuaian surat permohonan dengan syarat-syarat administratif sebagaimana tercantum dalam sub bab A. Surat permohonan yang tidak lengkap, akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon.
 - (2) Proses penelaahan terhadap buku-buku yang diajukan dilakukan oleh Tim Penelaah setelah syarat-syarat administrasi dipenuhi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- 3) Berdasarkan berita acara penelaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum.
- 4) Berdasarkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN, Pemohon mengurus penyelesaian barang impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang. Kemudian, untuk buku penyerahan dalam negeri penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat.

- 5) Untuk buku-buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran umum namun telah disahkan oleh Pusat Perbukuan sebagai buku pelajaran umum, berdasarkan surat pengesahan tersebut Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- 6) Berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pemohon dapat menyelesaikan proses impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk buku penyerahan dalam negeri.
- 7) Bagi buku-buku yang sudah pernah mendapatkan rekomendasi, apabila diajukan permohonan rekomendasi lagi, dapat dikeluarkan surat rekomendasi baru dari Kepala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional tanpa perlu dilakukan pengkajian ulang dengan mengacu pada berita acara penelaahan buku yang sudah ada.

Jika digambarkan maka Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat seperti pada gambar 3.

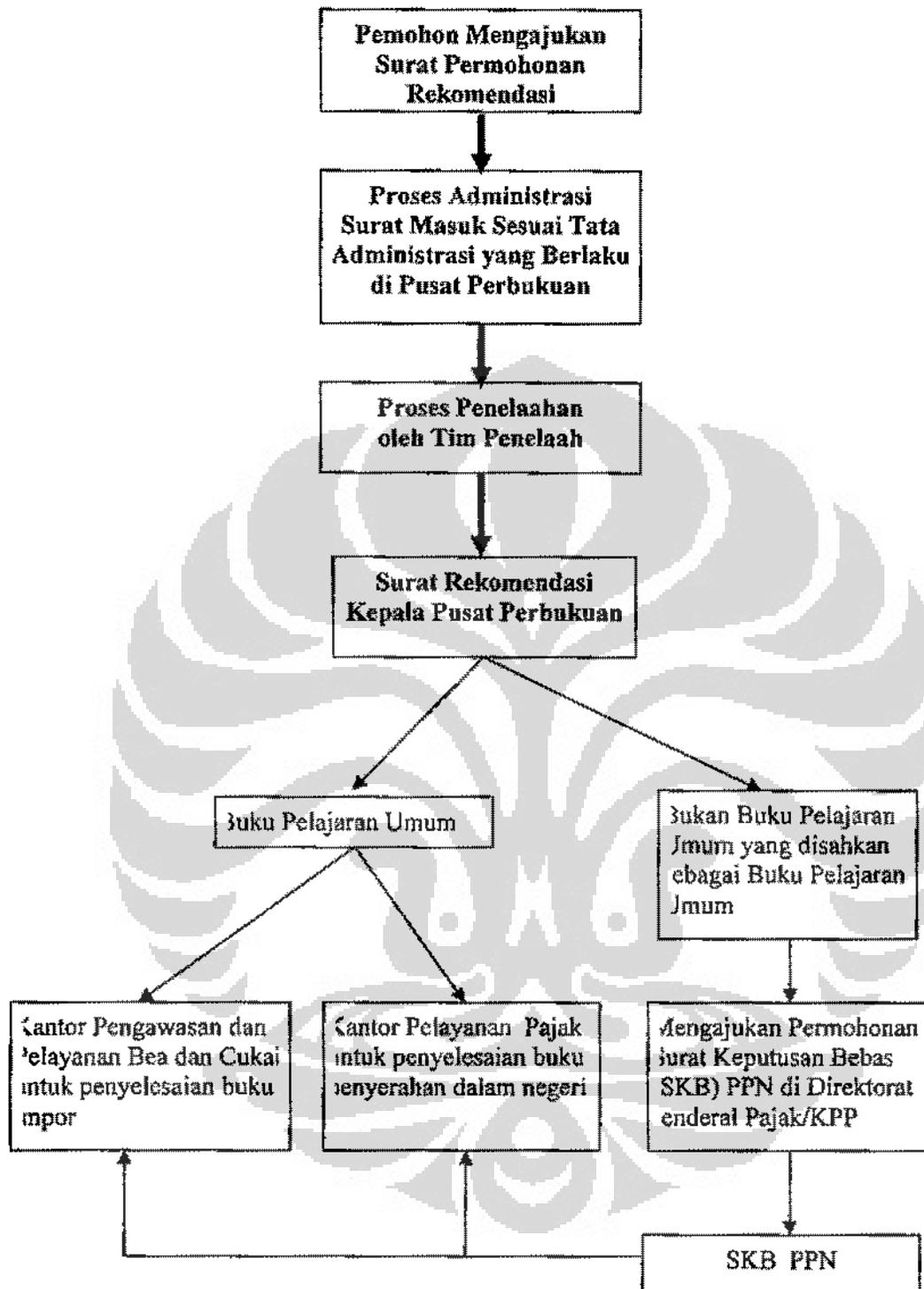
3.5.3 Persyaratan Administrasi Permohonan

Pemohon rekomendasi adalah:

- 1) Orang atau badan hukum yang melakukan impor buku; atau
- 2) Orang atau badan hukum yang menerima penyerahan buku dalam negeri.

Persyaratan administrasi untuk mendapatkan rekomendasi adalah sebagai berikut.

- 1) Pemohon yang melakukan impor buku wajib memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - Mengajukan surat permohonan yang dilampiri data atau informasi buku meliputi : jumlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku. Data atau informasi buku tersebut diserahkan dalam bentuk *compact disc* (CD) dan *hard copy*-nya kepada Pusat Perbukuan



Gambar 3. Prosedur Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber: Pedoman Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

- Melengkapi surat permohonan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - (1) Surat keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang dapat atau tidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Surat izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia apabila buku-buku yang diimpor adalah buku-buku yang berbahasa Indonesia.
 - (3) Salinan (foto copy) identitas pemohon (seperti KTP , SIUP).
 - (4) Contoh buku untuk masing-masing judul buku yang diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar setiap judul buku. Apabila contoh buku tidak dapat disampaikan maka sebagai gantinya pemohon wajib menyampaikan abstraksi / resume isi buku. Buku-buku contoh yang telah diserahkan kepada Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat permohonan menjadi arsip Pusat Perbukuan.
 - (5) Salinan (foto copy) dokumen impor berupa *Invoice*, *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB).
 - (6) Salinan (foto copy) dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dapat dipersamakan.
 - (7) Salinan (foto copy) dokumen pembayaran, berupa *Letter of Credit* (L/C) atau bukti transfer lainnya yang berkaitan dengan pembayaran impor.
 - Dalam hal buku yang diimpor merupakan hibah dari pihak-pihak di luar negeri maka dokumen pendukung tambahan yang perlu dilampirkan adalah salinan surat keterangan/pernyataan hibah dari pihak donatur atau dokumen sejenis yang dapat dipersamakan.
- 2) Pemohon yang menerima penyerahan buku dalam negeri, wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- Mengajukan surat permohonan yang dilampiri data atau informasi buku, meliputi jumlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku. Data atau informasi buku

tersebut diserahkan dalam bentuk *compact disc* (CD) dan *hard copy*-nya kepada Pusat Perbukuan

- Mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung berupa
 - (1) Salinan (foto copy) identitas pemohon (seperti KTP, SIUP).
 - (2) Contoh buku sebanyak 1 (satu) eksemplar masing-masing judul buku. Buku-buku contoh yang telah diserahkan kepada Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat permohonan menjadi arsip Pusat Perbukuan.

3.5.4 Ruang Lingkup Aspek Penelaahan

Pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum meliputi 2 (dua) kategori buku sebagai berikut.

- 1) Buku pelajaran umum yang berasal dari impor dan buku pelajaran umum penyerahan dalam negeri;
- 2) Buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran umum.

Pusat Perbukuan akan melakukan penelaahan aspek administratif dan teknis terhadap kedua kategori buku tersebut. Penelaahan dilakukan terhadap buku-buku yang masuk dalam kategori buku pelajaran umum dan buku-buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran umum.

(1) Penelaahan Buku Pelajaran Umum yang Berasal dari Impor dan dari Penyerahan Dalam Negeri untuk Direkomendasikan

Pemeriksaan terhadap buku pelajaran yang berasal dari impor meliputi aspek administratif dan teknis.

- a. Pemeriksaan aspek administratif meliputi:
 - (1) Kelengkapan isi surat permohonan;
 - (2) Kelengkapan lampiran dokumen pendukung.
- b. Pemeriksaan aspek teknis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 353/KMK.03/2001 meliputi:
 - (1) Kesesuaian buku yang diajukan dengan jenis-jenis buku yang tergolong buku pelajaran umum;

(2) Kesesuaian isi buku dengan jenjang sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLTP, SLTA, SLB, Perguruan Tinggi/Universitas, SMK, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah;

(3) Mendukung kurikulum sekolah sebagaimana tersebut pada butir b.

Apabila semua aspek administratif dan teknis di atas telah dipenuhi oleh buku yang ditelaah maka buku tersebut dapat direkomendasikan sebagai buku pelajaran umum.

(2) Penelaahan Buku yang Tidak Termasuk dalam Kategori Buku Pelajaran Umum untuk Disahkan sebagai Buku Pelajaran Umum

Untuk pengesahan buku-buku tersebut diperlukan penelaahan yang lebih mendalam daripada buku-buku yang sudah termasuk dalam kriteria sebagai buku-buku pelajaran umum. Penelaahan meliputi berbagai aspek antara lain materi, penyajian, dan bahasa/gambar.

Sebelum dilakukan penelaahan, pemeriksaan administratif tetap dilakukan sebagai standar pemeriksaan baku yang meliputi:

- (1) Kelengkapan isi surat permohonan;
- (2) Kelengkapan lampiran dokumen pendukung;

Penelaahan aspek teknis dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan akademik berikut (Kepmenkeu RI NO. 353/KMK.03/2001).

1. Kesesuaian buku yang diajukan dengan jenis-jenis buku yang tergolong buku pelajaran umum;
2. Kesesuaian isi buku dengan jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, SLB, Perguruan Tinggi/Universitas, SMK, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah;
3. Mendukung kurikulum sekolah sebagaimana tersebut pada butir b;
4. Kelayakan buku dari aspek materi, penyajian, dan bahasa/gambar meliputi :
 - a. Aspek Materi/Isi
 - (1) Bermanfaat bagi pendidikan;
 - (2) Sejalan dengan nilai-nilai moral dan kultural;

- (3) Memiliki kebenaran konsep keilmuan;
- (4) Memotivasi belajar, berpikir, dan kreativitas;
- (5) Mendukung kesatuan bangsa;
- (6) Membentuk kepribadian positif.

b. Aspek Penyajian

- (1) Sistematis dan logis;
- (1) Menarik, edukatif, dan imajinatif;
- (2) Mudah dipahami;
- (3) Mendorong minat baca
- (4) Objektif dan kontekstual.

c. Aspek Bahasa/Gambar

- (1) Bahasa/gambar komunikatif;
- (1) Bahasa/gambar memperjelas materi/isi.

Apabila semua aspek administratif dan semua aspek materi/isi ditambah minimal 3 (tiga) aspek penyajian, 1 (satu) aspek bahasa/gambar telah dipenuhi oleh buku yang ditelaah, maka buku tersebut dapat disahkan dan direkomendasikan sebagai buku pelajaran umum.

3.5.5 Keanggotaan dan Masa Tugas Tim Penelaah

Tim Penelaah adalah tim yang bertugas menelaah buku-buku yang diajukan oleh pemohon rekomendasi . Tim ini diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Tim Penelaah terdiri atas unsur dari Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional; Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan; dan ahli bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa, serta Teknologi Informasi.

Tim Penelaah Buku Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bertugas selama 1 (satu) tahun sesuai tahun anggaran. Tim diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

3.5.6 Tugas dan Fungsi Tim Penelaah

Dalam proses penelaahan buku-buku yang akan dibebaskan pajak pertambahan nilainya, Tim Penelaah bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi buku yang diajukan oleh pemohon rekomendasi.
- (2) Menelaah buku yang diajukan oleh pemohon rekomendasi berdasarkan aspek teknis yang telah ditetapkan dalam pedoman pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum.
- (3) Mengusulkan buku-buku yang dapat direkomendasikan sebagai buku pelajaran umum.
- (4) Menandatangani Berita Acara Penelaahan Buku dan melaporkan kegiatan penelaahan buku kepada Kepala Pusat Perbukuan.

3.5.7 Hasil Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pusat Perbukuan sudah dilaksanakan sejak tahun 2003, Hasil-hasilnya dapat dilihat dalam Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2008. Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2008 terlampir.

BAB 4

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Prosedur Pemberian Rekomendasi

4.1.1 Analisis pada saat Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemohon rekomendasi adalah orang atau badan hukum yang melakukan impor buku atau orang atau badan hukum yang menerima penyerahan buku dalam negeri. Pada awalnya pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum dengan melengkapi persyaratan administrasi baik untuk pemohon sebagai impor buku ataupun pemohon yang menerima penyerahan dalam negeri. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pemohon rekomendasi pada umumnya mengetahui surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuan setelah menerima surat pemberitahuan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukai. Pada tahap ini pemohon membawa surat permohonan yang langsung dibawa ke Subbid Pengendalian Mutu Buku namun ada juga yang melalui bagian pencatatan surat masuk Pusat Perbukuan yaitu di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha Pusat Perbukuan.

Pada tahap ini pada umumnya tidak terjadi kendala karena sifat dari pengajuan surat permohonan rekomendasi adalah terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya karena kegiatan pemberian rekomendasi ini merupakan suatu bentuk dari pelayanan Pusat Perbukuan terhadap publik dalam hal ini orang atau badan hukum yang melakukan impor buku maupun orang atau badan hukum yang menerima penyerahan buku dalam negeri.

4.1.2 Analisis Proses Administrasi Surat Masuk sesuai Tata Administrasi yang Berlaku Di Pusat Perbukuan.

Surat permohonan ada yang langsung dibawa ke Subbid Pengendalian Mutu Buku namun ada juga yang diserahkan ke bagian pencatatan surat masuk Pusat Perbukuan yaitu di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha Pusat Perbukuan. Pada dasarnya kondisi ini tidak menjadikan dualisme alur surat yang masuk ke Pusat Perbukuan, karena pada prinsipnya semua surat masuk akan diberikan disposisi terlebih dahulu Sub Bidang Rumah Tangga, yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan berkas di Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku Pusat Perbukuan.

Surat permohonan yang dibawa langsung ke Subbid Pengendalian Mutu Buku kemudian oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan akan dibawa ke Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha untuk mendapatkan pencatatan surat masuk. Sedangkan surat permohonan yang sampai di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha akan diberikan nomor surat masuk. Surat permohonan yang sudah mendapatkan nomor surat masuk akan dibawa ke Tim Penelaah Buku Pusat perbukuan di Subbid Pengendalian Mutu Buku untuk dilakukan penelaahan administrasi.

Pada tahap ini biasanya tidak terjadi kendala karena semua surat permohonan yang masuk di Pusat Perbukuan akan diterima dan diberikan nomor surat masuk tanpa kecuali.

4.1.3. Analisis Proses Penelaahan oleh Tim Penelaah

4.1.3.1 Analisis Penelaahan Buku Pelajaran Umum yang Berasal dari Impor dan dari Penyerahan Dalam Negeri.

Penelaahan atau pemeriksaan terhadap buku pelajaran yang berasal dari impor dan dari penyerahan dalam negeri meliputi aspek administrasi dan teknis.

4.1.3.1.1 Analisis Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan aspek administrasi meliputi kelengkapan isi surat permohonan dan kelengkapan dokumen pendukung. Pemeriksaan aspek administrasi ini dilakukan oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan dengan menggunakan format pemeriksaan persyaratan kelengkapan administrasi dalam

rangka pemberian rekomendasi dan pengesahan sebagai buku pelajaran umum untuk pembebasan pengenaan PPN kategori buku impor untuk pemohon yang melakukan impor buku. Sedangkan untuk pemohon rekomendasi yang menerima penyerahan buku dalam negeri akan dilakukan pemeriksaan aspek administrasi oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan dengan menggunakan format pemberian rekomendasi dan pengesahan sebagai buku pelajaran umum untuk pembebasan pengenaan PPN kategori buku penyerahan dalam negeri. Kedua bentuk format tersebut dapat dilihat dalam lampiran tugas akhir ini.

Pada tahap ini persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon yang melakukan impor buku lebih banyak jika dibandingkan dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon yang menerima penyerahan dalam negeri. Perbedaan ini terletak pada penyerahan dokumen pendukung untuk pemohon yang melakukan impor buku yaitu adanya surat dari Kejaksaan Agung tentang dapat atau tidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke wilayah negara kesatuan RI, Surat Ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI apabila buku-buku yang diimpor adalah buku-buku yang berbahasa Indonesia, contoh buku untuk masing-masing judul buku atau abstraksinya, salinan dokumen impor, salinan dokumen pembayaran. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara pengendalian internal Pusat Perbukuan.

Dalam hal buku yang diimpor adalah merupakan hibah dari pihak-pihak di luar negeri, maka ada dokumen tambahan yang perlu dilampirkan yaitu fotocopy surat keterangan/ pernyataan hibah dari pihak donatur atau dokumen sejenis yang dapat dipersamakan.

Dalam kenyataan di lapangan yang terjadi selama ini, ada beberapa persyaratan yang seringkali sulit dipenuhi oleh pemohon yang mengimpor buku ataupun dari pemohon yang menerima penyerahan dalam negeri. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pemohon dari awal mengajukan surat permohonan rekomendasi. Persyaratan yang seringkali sulit dipenuhi ini adalah berkaitan dengan surat permohonan yang tidak dilampiri data atau informasi buku meliputi: jumlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku. Data atau informasi buku tersebut belum diserahkan dalam bentuk Compact Disc (CD) dan *hard-copy*nya kepada Pusat Perbukuan.

Persyaratan lain yang seringkali belum dipenuhi oleh pihak importir pada awal pemohon mengajukan permohonan rekomendasi adalah tidak dapat memberikan contoh buku masing-masing judul buku yang diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar setiap judul buku hal ini mengingat buku-buku yang akan diimpor masih berada di pihak Bea Cukai. Dengan demikian yang terjadi selama ini untuk pemohon yang mengimpor buku hanya dapat memberikan abstraksi/resume isi buku.

Kenyataan di atas tentunya akan berakibat terhadap semakin lamanya proses pemberian rekomendasi oleh Pusat Perbukuan dan kerugian dari pihak pemohon itu sendiri. Hal ini mengingat Tim Penelaah Pusat Perbukuan baru akan bekerja setelah persyaratan administrasi dipenuhi oleh pemohon sementara buku-buku yang akan diimpor sudah berada di pihak Bea Cukai yang tentunya berakibat terhadap pengeluaran uang untuk sewa gudang.

Akibat lain yang dirasakan oleh pihak Pusat Perbukuan adalah seringkali Tim Penelaah Pusat Perbukuan harus membantu menyiapkan *hard-copy*nya dari data atau informasi dari buku yang diajukan jika pemohon menyerahkan dalam bentuk *Compact Disc (CD)*. Hal ini terjadi karena seringkali *hard-copy* dari data atau informasi dari buku yang diajukan tidak sesuai dengan format yang diminta oleh Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat rekomendasi. Kondisi ini tidak menjadi masalah jika data tersebut hanya terdiri dari beberapa lembar, namun akan menjadi masalah jika terdiri dari beratus lembar. Seperti terjadi pada pemohon dari Yayasan Tjiptamas Eka Bangsa pada Juni Tahun 2008 ini yang terdiri dari 11.100 judul.

Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang dapat atau tidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia juga seringkali belum dapat dipenuhi oleh importir pada awal pemohon mengajukan surat permohonan. Hal ini dikarenakan belum semua importir mengetahui bentuk format Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini ataupun karena memang belum semua mengetahui harus dilampirkannya surat keterangan ini sebagai salah satu persyaratan administrasi di Pusat Perbukuan.

Memberikan contoh format Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pemohon rekomendasi sebelumnya merupakan hal yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan untuk mengatasi kondisi di atas. Diharapkan kondisi ini akan memperlancar pemberian rekomendasi karena proses penelaahan oleh Pusat Perbukuan akan menunggu kelengkapan administrasi pemohon terlebih dahulu sebelum diberikan surat rekomendasi kepada pemohon. Dengan demikian jika surat permohonan tidak lengkap, maka surat permohonan tersebut akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon.

Pada umumnya untuk permohonan dimana pemohon menerima penyerahan buku dalam negeri permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah dalam hal melampirkan data atau informasi buku seperti pada permohonan yang berasal dari impor di atas. Sedangkan untuk melampirkan dokumen pendukung yaitu salinan identitas pemohon dan contoh buku sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk masing-masing judul buku tidak mengalami hambatan karena hampir semua pemohon dapat memenuhi ini.

4.1.3.1.2 Analisis Pemeriksaan Teknis

Pada tahap ini pemeriksaan akan dilakukan oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan setelah lolos dari pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan aspek teknis merujuk kepada Kepmenkeu RI No. 353/KMK.03/2001 yang meliputi bahwa buku-buku yang akan dikategorikan sebagai buku pelajaran umum adalah buku-buku yang sesuai dengan jenis buku pelajaran umum, kesesuaian isi buku dengan jenjang sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi serta mendukung kurikulum pada jenjang sekolah tersebut.

Pemeriksaan buku menggunakan format pemeriksaan kategori buku yang akan direkomendasikan sebagai buku pelajaran umum. Format pemeriksaan kategori buku yang akan direkomendasikan sebagai buku pelajaran umum terlampir.

Pada tahap ini yang seringkali mengalami kendala adalah tidak tersedianya contoh buku sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk masing-masing judul buku bagi pemohon yang melakukan impor buku seperti dijelaskan di atas. Sehingga dasar penelaahan buku hanya berdasarkan abstraksi/resume isi buku yang diberikan oleh

importir bukan berdasarkan fisik bukunya. Kondisi ini tentunya akan mengurangi keakuratan dalam proses penelaahan buku.

Kondisi yang lebih buruk dari hal di atas adalah pernah ditemui ada pemohon yang melakukan impor buku terpaksa sekali tidak dapat memberikan abstraksi dari buku yang akan dimintakan rekomendasi. Sehingga dasar penelaahan hanya didasarkan pada daftar judul buku yang diberikan pihak importir dan merujuk kepada institusi yang meminta rekomendasi. Institusi dalam hal ini adalah jika bergerak dalam bidang pendidikan maka kemungkinan besar akan diberikan rekomendasi. Hal inilah yang oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan disebut dengan "Manajemen Resiko".

Pada akhirnya yang mendasari penelaahan terhadap buku-buku yang berkategori buku pelajaran umum baik berasal dari impor maupun penyerahan dalam negeri adalah secara substansi Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan dipercaya mempunyai kemampuan untuk menelaah isi buku-buku tersebut sehingga dapat dikategorikan dalam kategori buku pelajaran umum. Kepercayaan ini mengingat keanggotaan Tim Penelaah berasal dari berbagai bidang keahlian dan institusi yang berbeda. Jadi, bisa dikatakan bahwa untuk buku-buku impor dan penyerahan dalam negeri dianggap bahwa awalnya buku-buku tersebut belum bisa dipastikan isinya termasuk buku-buku pelajaran umum sebelum dilakukan penelaahan oleh Tim Penelaah Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.

Hasil penelaahan dituangkan dalam suatu berita acara, berdasarkan berita acara penelaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum.

Berdasarkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN, Pemohon mengurus penyelesaian barang impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang. Kemudian, untuk buku penyerahan dalam negeri penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pemohon dapat menyelesaikan proses impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk buku penyerahan dalam negeri.

Permasalahan di lapangan dalam rangka mengeluarkan rekomendasi atas importasi buku-buku yang diajukan pembebasan BM dan PDRI, Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional memerlukan buku-buku bersangkutan. Hal ini mengingat proses penelaahan akan berlangsung lebih sempurna jika tersedia fisik bukunya. Apabila memang diperlukan pengambilan contoh barang, ada prosedur yang harus dilalui oleh importir yaitu sebagai berikut. (sesuai dengan balasan surat dari pihak Bea Cukai ke Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta).

- 1) Importir dapat mengajukan permohonan tertulis tentang pengambilan contoh barang kepada Kepala kantor Pelayanan Bea dan Cukai up Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan dan pada saat pengambilan barang dibuatkan Berita acara pengambilan Barang untuk contoh.
- 2) Importir juga harus berkoordinasai dengan pengelola tempat penimbunan untuk pembukaan kontainer, dengan jasa pergeseran/pemindahan kontainer yang semua bisa menimbulkan cost bagi importir.
- 3) Alternatif lainnya adalah importir mengimpor sebagian buku saja dalam rangka mengurus rekomendasi melalui mekanisme kiriman pos atau jasa titipan atau dibawa langsung oleh penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf n jo. Kepmenkeu No. 490/KMK.05/1995 namun dengan batasan barang bawaan penumpang untuk setiap orang maksimum FOB USD 250.00; barang kiriman pos tidak melebihi FOB USD 50.00, barang memalui jasa titipan maksimal FOB USD 50.00, melebihi batas nilai yang ditentukan importir harus melunasi atas Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Satu proses yang belum dilakukan oleh Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta adalah mengevaluasi atau mengontrol para importir sebagai pemohon rekomendasi baik yang berasal dari suatu institusi pendidikan terlebih dari pihak-pihak lain yang bergerak dalam bidang bisnis setelah mereka menerima surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum dan mengeluarkan barang dari pabean, apakah buku-buku yang dikeluarkan dari pabean benar-benar sesuai dengan daftar judul yang tertera pada surat rekomendasi mengingat yang terjadi selama ini pihak importir tidak memberikan contoh dari setiap buku yang dikeluarkan dari pabean

ke Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta. Hal ini mengingat jika sampai terjadi penyimpangan ketidaksesuaian antara daftar judul yang ada di lampiran surat permohonan dengan kenyataan di lapangan, maka negara jelas akan dirugikan.

4.1.3.2 Analisis Penelaahan Buku yang Tidak Termasuk dalam Kategori Buku Pelajaran Umum untuk Disahkan sebagai Buku Pelajaran Umum.

Pada tahap ini Pusat Perbukuan diberi wewenang penuh oleh Menteri Pendidikan Nasional guna memberikan pengesahan sebagai buku pelajaran umum. Dalam proses penelaahan dalam kategori ini diperlukan penelaahan yang lebih mendalam daripada terhadap penelaahan buku-buku yang sudah termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum seperti di atas. Pemeriksaan meliputi aspek administrasi dan pemeriksaan teknis.

4.1.3.2.1 Analisis Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan aspek administrasi tidak berbeda seperti pemeriksaan aspek administrasi untuk kategori penelaahan buku pelajaran umum yang berasal dari impor dan dari penyerahan dalam negeri seperti dijelaskan di atas. Pada tahap ini kendala yang dihadapi adalah sama seperti pada saat pemeriksaan administrasi untuk kategori penelaahan buku pelajaran umum yang berasal dari impor dan dari penyerahan dalam negeri.

4.1.3.2.1 Analisis Pemeriksaan Teknis

Seperti disebutkan di atas proses penelaahan dalam kategori ini diperlukan penelaahan yang lebih mendalam daripada terhadap penelaahan buku-buku yang sudah termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum. Hal ini terjadi pada pemeriksaan aspek teknis.

Kedalaman penelaahan terletak pada harus dipenuhinya ketiga syarat dari pemeriksaan aspek teknis seperti terjadi untuk penelaahan buku-buku berkategori buku pelajaran umum. Masih ditambah lagi dengan penelaahan terhadap kelayakan buku dari aspek materi, penyajian dan bahasa/gambar. Buku-buku dari pemohon dapat dikategorikan sebagai buku pelajaran umum jika memenuhi

semua aspek administrasi dan semua aspek materi/isi ditambah minimal 3 (tiga) aspek penyajian, 1 (satu) aspek bahasa/gambar. Tim Penelaah Pusat Perbukuan melakukan penelaahan buku berkategori ini menggunakan format instrumen penelaahan buku yang dikecualikan sebagai buku pelajaran umum untuk dikategorikan sebagai buku pelajaran umum. Format penelaahan terlampir.

Penelaahan dalam kategori ini Pusat Perbukuan hanya menerapkan pada penelaahan buku-buku yang semula tidak berkategori buku pelajaran umum terhadap 3 (tiga) jenis buku yang semula belum berkategori sebagai buku pelajaran umum yaitu buku-buku yang termasuk ke dalam buku roman populer dalam bentuk bacaan fiksi, buku komik yang materinya mengandung unsur-unsur pendidikan, dan buku reproduksi lukisan, yang materinya menyetengahkan atau mengindikasikan adanya contoh-contoh aliran dalam seni lukis. Jadi penelaahan hanya dilakukan untuk 3 (tiga) jenis buku dari 11 (sebelas) jenis buku yang ada dalam batasan buku yang tidak termasuk dalam buku pelajaran umum.

Hal ini dilakukan oleh Pusat Perbukuan mengingat lingkup kerja dari Pusat Perbukuan adalah pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Di sisi lain hal ini dilakukan untuk penghematan anggaran negara yang diperlukan untuk proses penelaahan. Pada kenyataan yang terjadi selama ini di lapangan adalah pemohon jarang atau hampir dapat dikatakan tidak ada dari kategori ini yang mengajukan permohonan ke Pusat Perbukuan.

Untuk buku-buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran umum namun telah disahkan oleh Pusat Perbukuan sebagai buku pelajaran umum, berdasarkan surat pengesahan tersebut Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak setempat.

4.1.4. Analisis Pemberian Surat Rekomendasi Kepala Pusat Perbukuan

Setelah dilakukan penelaahan baik dari sisi aspek administrasi dan aspek teknis dan dinyatakan bahwa buku-buku yang dimintakan rekomendasi dan pengesahan oleh pemohon dapat dikategorikan sebagai buku pelajaran umum maka hasil ini oleh Tim Penelaah Buku dituangkan dalam suatu Berita Acara.

Berdasarkan Berita acara penelaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum.

Pada tahap ini yang seringkali menjadi kendala adalah bersangkutan dengan birokrasi dalam proses penandatanganan surat rekomendasi dari Kepala Pusat perbukuan. Hal ini mengingat kesibukan dari seorang Kepala Pusat Perbukuan. Di sisi lain penerbitan surat rekomendasi ini sangat diharapkan secepatnya dapat diterbitkan karena berkaitan dengan uang sewa gudang yang harus dikeluarkan oleh importir buku, ataupun kepentingan pendidikan yang lain untuk pemohon yang bergerak dalam pelayanan publik.

Kendala di atas dicari solusinya oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan dengan menyiapkan surat rekomendasi beserta lampirannya bersamaan dengan proses penelaahan berlangsung. Diharapkan dengan cara seperti ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk penerbitan surat rekomendasi.

4.1.5. Analisis Pengendalian Internal terhadap Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN di Pusbuk.

Pengendalian Internal terhadap pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN di Pusbuk yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian dalam rangka pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan dapat dilihat dari adanya uraian tugas dan fungsi dari anggota Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan sesuai tugas yang diembannya. Hal ini sebagai cara suatu unit kerja mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab.

Tim Penelaah berasal dari berbagai latar belakang instansi yaitu terdiri atas unsur dari Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional; Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan (mulai tahun anggaran 2008 tidak berperan serta lagi).

Serta dari berbagai latar belakang dalam keahlian bidang studi yang berbeda yaitu ahli bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa, serta Teknologi Informasi.

Tim Penelaah bekerja sesuai dengan pedoman pemberian rekomendasi dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Produk)/POS (Prosedur Operasional standar) pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN. POS atau SOP yang disusun pada awal kegiatan ini merupakan pencerminan dari filosofi dan gaya operasional organisasi Pusat Perbukuan.

Tim Penelaah pada akhir kegiatan berkewajiban untuk melaporkan hasil penelaahan kepada Kepala Pusat Perbukuan sebagai seorang WMM (Wakil Manajemen Mutu). Hasil penelaahan ini dituangkan melalui berita acara penelaahan. Dengan dasar berita acara ini Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan Surat Rekomendasi. Hal tersebut mencerminkan adanya Struktur Organisasi dari Pusat Perbukuan yang jelas telah menunjukkan adanya kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memiliki hubungan yang sesuai.

2) Analisis Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Proses Identifikasi dan penilaian resiko dalam rangka pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secara eksplisit. Proses Identifikasi sampai level program tidak tertuang secara eksplisit dan penilaian resiko sampai level aktivitas juga tidak tertuang secara eksplisit dalam sebuah dokumen. Penilaian resiko masih dinyatakan secara implisit oleh kepala subbidang Pengendalian Mutu Buku di Pusat Perbukuan. Penilaian resiko yang dimaksud seharusnya adalah proses identifikasi dan analisis resiko yang relevan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Penilaian resiko sudah dijalankan dalam kegiatan penelaahan Tim Penelaah sebatas pada penilaian resiko dalam bentuk manajemen resiko seperti dijelaskan dalam analisis proses penelaahan untuk buku-buku impor yang tidak dapat menyerahkan bukti fisiknya.

Penilaian resiko juga belum dilakukan oleh Pusat Perbukuan setelah diterbitkannya surat rekomendasi. Pusat Perbukuan belum melakukan pos audit

kepada pihak-pihak pemohon apakah daftar judul buku yang diajukan sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di gudang Bea Cukai sebagai tempat pengeluaran buku yang diimpor tersebut.

3) Analisis Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan bagian integral dari perencanaan, implementasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban karyawan terhadap sumber daya pemerintah dan pencapaian hasil yang efektif.

Aktivitas pengendalian pada semua kegiatan dan fungsi entitas. Hal ini termasuk aktivitas seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, laporan kinerja, pemeliharaan keamanan, pemeliharaan rekaman yang terkait yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dokumennya.

Pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan sudah melaksanakan aktivitas pengendalian. Hal ini tercermin pada hasil-hasil penelaahan dan berkas-berkas dari kegiatan pemberian rekomendasi diadministrasikan secara rapi dalam otner dokumen dan rekaman yang didalamnya terdapat surat masuk, surat keluar, SK kegiatan, undangan-undangan, daftar hadir, berita acara penelaahan, proposal kegiatan, dan laporan kegiatan penelaahan.

Sebelum melaksanakan kegiatan disusun suatu proposal kegiatan untuk menyesuaikan biaya kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Hal ini juga mencerminkan adanya aktivitas persetujuan dari kepala subbid pengendalian mutu buku dan kepala subbag pengembangan naskah dan pengendalian mutu bukuterhadap setiap penelaahan yang akan dilakukan.

4) Analisis Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem akuntansi dalam pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan menjadi satu dengan sistem akuntansi Pusat Perbukuan dalam bentuk laporan barang milik Negara yang dibuat berdasarkan pada Standar Akuntansi Barang Milik Negara. Laporan ini dibuat oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga yang memiliki kewenangan merencanakan dan melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, kebersihan dan keindahan di lingkungan pusat.

Laporan keuangan yang terdiri atas laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan ini dibuat oleh Kepala Subbagian Keuangan di Pusat Perbukuan yang mempunyai wewenang merencanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran pusat.

Komponen komunikasi dalam pemberian rekomendasi baru dilakukan secara intern dalam bentuk pemberian informasi kepada para pemohon yang melakukan konfirmasi langsung ke Pusat Perbukuan. Sedangkan komunikasi secara ekstern hanya dilakukan dalam tahap awal penyusunan rekomendasi pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum. Secara rutin komunikasi ekstern dalam bentuk pengumuman, brosur, pengumuman ataupun website belum ada.

Di Pusat Perbukuan, Kepala Bidang Informasi Perbukuan yang mempunyai wewenang untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi perbukuan belum menyediakan sarana khusus untuk program kegiatan pemberian rekomendasi sebagai pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN ini.

5) Analisis Pengawasan (*Monitoring*)

Komponen pengawasan di Pusat Perbukuan dilakukan melalui pengendalian alat pemantau dan pengukuran, Rapat Tinjauan Manajemen, Kepala subbidang dan kepala bidang masing-masing, Kepala Pusat, dan Wakil manajemen Mutu.

Kegiatan pemberian rekomendasi diawasi langsung oleh Kepala Subbidang Pengendalian mutu Buku dan Kepala Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku sebagai bagian dari kepanjangan tangan Kepala Pusat Perbukuan. Hal ini mengingat kedua personil ini secara langsung menjadi anggota tim penelaahan dari pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan. Sebagai alat pemantau dan pengukuran pemberian rekomendasi dilakukan dalam bentuk pengukuran daya serap kegiatan pada setiap evaluasi kegiatan di bagian perencanaan Subbid Pengendalian Mutu Buku.

Pengawasan akan menjamin efektivitas pengendalian intern sepanjang waktu. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus dan evaluasi secara periodik. Oleh karena itu, evaluasi kegiatan pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan harus dilakukan dan mempunyai periode tertentu.

4.1.6 Analisis Umum Prosedur Pemberian Rekomendasi

Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang Pegendalian Mutu Buku mempunyai fungsi strategis. Fungsi strategis tersebut karena Pusat Perbukuan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum sehingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi pemerintah hal ini akan memberikan akibat adanya pengurangan pemasukan negara dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku pelajaran umum dan pengeluaran anggaran pemerintah untuk pengadaan program kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Perbukuan Jakarta. Di sisi lain bagi pihak pemohon rekomendasi terutama bagi pemohon yang bergerak dalam bidang perdagangan buku-buku pelajaran umum, pemberian rekomendasi ini akan berakibat lebih murah harga buku pelajaran umum di pasar.

Pemberian rekomendasi yang dilakukan di Pusat Perbukuan selama ini merupakan salah satu pelayanan terhadap publik, dalam arti pemberian rekomendasi ini tidak dikenakan biaya dari setiap pemohon rekomendasi. Tujuan sebenarnya dari pemerintah melalui kegiatan pemberian rekomendasi ini adalah akan dapat memberikan harga buku pelajaran umum yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Namun jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati, hal ini akan menjadi peluang kecurangan dari pemohon rekomendasi yang bergerak semata-mata mencari keuntungan untuk merauk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini mengingat, pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan selama ini selain tidak dipungut biaya, batasan jumlah judul buku dan jenis buku pelajaran umum yang seperti apa, belum ditetapkan. Demikian juga pos audit ke setiap pemohon rekomendasi belum dilakukan. Anggaran pemerintah untuk pemberian rekomendasi tentunya akan melenceng dari tujuan semula bahkan dapat memberikan peluang adanya *moral hazard* pemohon rekomendasi yang tidak terbatas.

Melihat kenyataan di atas, maka menurut penulis prosedur pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan sebaiknya ditambahkan dengan dibebankannya biaya kepada setiap pemohon rekomendasi untuk setiap judul buku yang akan diajukan pembebasan pengenaan PPN-nya serta ditambahkan juga dengan adanya data harga jual untuk setiap judul buku di informasi buku yang akan diajukan rekomendasinya. Hal ini selain dapat mengurangi resiko di atas, juga untuk mengatasi permasalahan yang pernah dihadapi oleh tim penelaah Pusat Perbukuan dalam penyiapan lampiran rekomendasi terhadap pemohon rekomendasi yang mengajukan permohonan rekomendasi sebanyak 11.100 judul buku pada bulan juni tahun 2008. Akan lebih baik lagi kenggotaan tim penelaah buku Pusat Perbukuan ditambahkan dengan seorang yang ahli dalam *cost accounting*.

Pemohon rekomendasi berasal dari orang atau badan hukum yang melakukan impor buku dan ada pula yang berasal dari penyerahan dalam negeri. Proses penelaahan teknis dari buku yang berasal dari impor sering ditemui kendala dengan tidak adanya buku sebagai bahan penelaahan. Kondisi ini menjadikan abstraksi dari buku yang diajukan sebagai bahan penelaahan oleh tim penelaah Pusat Perbukuan, bahkan ada juga yang hanya dapat mengajukan judul-judul bukunya saja. Hal ini memaksa tim penelaah Pusat Perbukuan hanya menggunakan daftar judul buku dan asal/latar belakang dari pemohon sebagai bahan penelaahan. Kenyataan ini tentunya akan mengurangi kesempurnaan penelaahan di Pusat Perbukuan dan terkesan proses penelaahan hanya merupakan persyaratan administratif saja. Padahal di sisi lain tim penelaah Pusat Perbukuan beranggotakan orang-orang yang dianggap pakar di bidangnya dan dari instansi yang relevan dengan pemberian rekomendasi ini.

Kondisi di atas menurut penulis akan dapat diatasi dengan proses penelaahan dilakukan setelah para pemohon dapat memberikan contoh buku impor untuk tiap judul buku ke Pusat Perbukuan, walaupun barang belum seluruhnya bisa diambil dari Bea Cukai. Hal ini memang akan berakibat adanya *cost* pengambilan contoh barang di Bea Cukai dari setiap pemohon rekomendasi. Namun di sisi lain banyak nilai positif dari tindakan ini yaitu dapat mengatasi permasalahan-permasalahan di atas.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian tentang pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Analisis pada saat pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi sudah berjalan dengan baik, karena pada prinsipnya semua surat permohonan akan diterima oleh Pusat Perbukuan dan dicatat sebagai surat masuk. Sifat pemberian rekomendasi ini merupakan satu bentuk pelayanan kepada publik, terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Kendala baru akan terjadi pada saat pemeriksaan administrasi surat permohonan.
- 2) Analisis proses surat masuk sesuai tata administrasi yang berlaku di Pusat Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Semua surat masuk akan dicatat di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha Pusat Perbukuan. Proses berikutnya surat permohonan akan dibawa ke Sub Bidang Pengendalian Mutu Buku untuk dilakukan proses penelaahan.
- 3) Analisis terhadap proses penelaahan administrasi maupun teknis untuk buku-buku berkategori impor dan penyerahan dalam negeri oleh tim penelaah Pusat Perbukuan belum mencapai maksimal. Hal ini bukan disebabkan oleh kapasitas sebagai penelaah namun disebabkan ketidaklengkapan dari surat permohonan dan dokumen pendukung dari pemohon rekomendasi.
- 4) Penelaahan terhadap buku-buku yang tidak termasuk buku berkategori buku pelajaran umum dilakukan lebih mendalam daripada untuk buku-buku pelajaran umum yang berasal dari impor dan penyerahan dalam negeri. Pusat Perbukuan hanya menerima penelaahan terhadap 3 (tiga)

jenis dari 11 (sebelas) jenis buku-buku yang tidak termasuk buku pelajaran umum. Tiga (3) jenis buku tersebut adalah buku roman populer dalam bentuk bacaan fiksi, buku komik yang materinya mengandung unsur-unsur pendidikan, dan buku reproduksi lukisan, yang materinya mengetengahkan atau mengindikasikan adanya contoh-contoh aliran dalam seni lukis. Analisis terhadap proses penelaahan administrasi maupun teknis untuk buku-buku berkategori tidak termasuk buku pelajaran umum belum mencapai maksimal. Hal ini disebabkan karena kendala yang dihadapi seperti untuk penelaahan buku-buku berkategori pelajaran umum untuk impor dan penyerahan dalam negeri, di sisi lain jarang terjadi pemohon yang meminta rekomendasi berkategori ini.

- 5) Analisis terhadap penerbitan surat rekomendasi oleh Kepala Pusat Perbukuan belum mencapai maksimal. Hal ini disebabkan karena masalah birokrasi dan kesibukan dari Kepala Pusat Perbukuan.
- 6) *Internal Control* dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan sudah dilakukan. Analisis pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian sudah baik, penilaian resiko belum maksimal, aktivitas pengendalian sudah baik, informasi dan komunikasi belum maksimal dan pengawasan sudah baik.

5.1 Rekomendasi atau Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta, kiranya dapat diberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

5.1.1 Untuk Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta

Pertama dilakukan perubahan prosedur pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk pembebasan peneanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebagai berikut:

- 1) Memasukkan aspek biaya produksi (*analisis cost*) dan keuntungan dalam proses penelaahan, untuk membatasi adanya *moral hazard* dari pemohon rekomendasi. Sehingga perlu ditambahkan dalam data/informasi tentang buku dalam hal harga jual dari setiap judul buku.
- 2) Adanya kualifikasi dari penelaah dimana perlu ditambahkan adanya orang *cost accounting*.
- 3) Ketaatan dari setiap pemohon rekomendasi dalam memberikan kelengkapan dokumen pendukung dan contoh buku sebagai bahan penelaahan.
- 4) Adanya penilaian resiko terhadap buku-buku yang pantas diberikan rekomendasi. Deberikan kriteria buku pendidikan yang bagaimana yang akan diberikan rekomendasi.
- 5) Diberikan kriteria sejauh mana objektivitas dari tim penelaah dalam melakukan penelaahan buku.

Perlu dilakukan sosialisasi secara lebih luas lagi terutama kepada orang atau badan hukum yang melakukan impor buku dan kepada orang atau badan hukum yang menerima penyerahan buku dalam negeri tentang prosedur pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN. Selanjutnya dalam kaitannya dengan hal ini perlu disediakan media komunikasi secara ekstern secara rutin dalam bentuk pengumuman, brosur, pengumuman ataupun wibsite.

5.2.2. Untuk Studi yang Akan Datang

Untuk studi yang akan datang perlu adanya penelitian lebih lanjut pada para pemohon terutama untuk para pemohon yang berasal dari importir baik dari suatu institusi pendidikan terlebih dari pihak-pihak lain yang bergerak dalam bidang bisnis setelah mereka menerima surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum dan mengeluarkan barang dari pabean, apakah buku-buku

yang dikeluarkan dari pabean benar-benar sesuai dengan daftar judul yang tertera pada lampiran surat rekomendasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat yang terjadi selama ini pihak importir tidak memberikan sampel dari setiap buku yang dikeluarkan dari pabean ke Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.

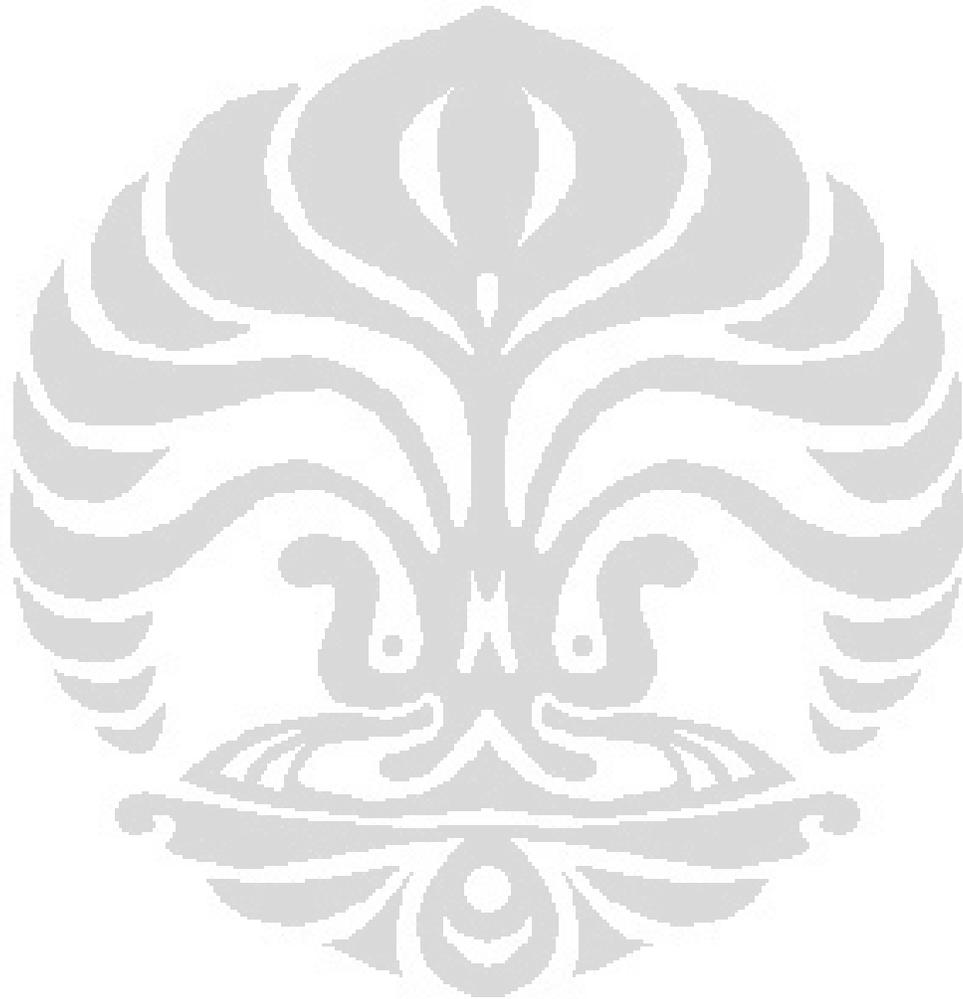


DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas Wirawan, Suhartono Rudy. *Panduan Komprehensif dan Praktis Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- GAO. *Standards For Internal Control in The Federal Government*. Washington, U.S. Genral Accounting Office, 1999.
- Graham L. *Internal control Canada*, John Willey and Sons, 2007.
- Gunadi, John L. Hutagaol, Richard Burton, Liberty Pandiangan, Wirawan Ilyas, Yoyok Satiomo. *Perpajakan*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1999.
- Iksan, M. *Bahan Kuliah Struktur Pengendalian Internal*. Jakarta, MAKSI UI, 2007.
- Ismawan Indra. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Elex Media Komputindo, 2001.
- Kepmenkeu 353/KMK.03/2001 tentang *Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-Buku Pelajaran agama yang atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta, 2001.
- Kepmenkeu No. 63/KMK.03/2002 tentang *Perubahan atas Kepmenkeu No. 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu*, Jakarta, 2002.
- Kepmendiknas No. 152/P/2002 tentang *Pemberian Wewenang kepada Pusat Perbukuan atas nama Mendiknas untuk melaksanakan pengesahan terhadap buku-buku yang tidak termasuk buku pelajaran umum menjadi buku pelajaran umum.*, Jakarta, 2002.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 042/C/1/Kep/79 tanggal 25 April 1979.
- Marsury R., *"Kebijakan Fiskal"*, YP4, 1999
- Mulyono Djoko. *Pajak Pertambahan Nilai*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.

- Nordiawan Dedy, *Bahan Kuliah Pengendalian Internal*. MAKSI UI. Jakarta, 2007.
- Pedoman Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pusbuk, Depdiknas, Jakarta, 2007.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang *Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa kena pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak pertambahan Nilai*, Jakarta, 2003.
- Root, J.S. *Beyond COSO Intern Control to Enhace Corporate Governance*, New York, John Wiew & Sons, 1998.
- Rosdiana dan Tarigan. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- SK Kapusbuk No. 273/A8.2/LL/2008 *tentang Pengangkatan Tim Penelaah Buku untuk Dikategorikan sebagai Buku Pelajaran Umum yang dapat dibebaskan PPN-nya*, Jakarta, 2008.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-603/BC/2005 *tentang mengeluarkan kebijakan pembebasan bea masuk dan PPn impor buku*, Jakarta. 2005.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Nomor: SE-28/PJ.51/2002 *tentang Penyampaian nama Pejabat yang diberi wewenang*, Jakarta, 2002.
- Tait, Alan T., *Value Added Tax, International Practice and Problem*, New York International Montary Fund. 1998.
- Sukardji Untung, “ *Pajak Pertambahan Nilai*”, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 *tentang Perubahan Kedua atas UU No.8 Thn 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta, 2000.
- Wilkinson et. Al. *Accounting Information Systems*. Canada, John Willey & Sons, 2000.

LAMPIRAN



**INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PENGESAHAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM
UNTUK PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KATEGORI BUKU IMPOR**

Nama Penerbit :

Alamat :

No	Kriteria	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Mengajukan Surat Permohonan dengan dilampiri:		
	a. Jumlah Judul Buku		
	b. Judul Buku		
	c. Nama Penulis		
	d. Nama Penerbit		
	e. Tahun Penerbitan		
	f. Sasaran Peruntukan Buku		
	(Data atau informasi di atas dalam bentuk <i>Compact Disc CD</i>)		
2.	Melengkapi Surat Permohonan dengan dilampiri:		
	a. Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang dapat atau tidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.		
	b. Surat Izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan apabila buku-buku yang diimpor adalah buku-buku yang berbahasa Indonesia.		
	c. Salinan (foto copy) identitas pemohon (seperti KTP, SIUP)		
	d. Contoh buku untuk masing-masing judul buku yang diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar setiap judul buku. Apabila contoh buku tidak dapat disampaikan maka sebagai gantinya pemohon wajib menyampaikan abstraksi/resume isi buku.		
	e. Salinan (foto copy) dokumen impor berupa <i>invoice</i> , <i>Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airway Bill (AWB)</i>		
	f. Salinan (foto copy) dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dapat dipersamakan.		
	g. Salinan (foto copy) dokumen pembayaran, berupa <i>Letter of Credit (LC)</i> atau bukti transfer lainnya yang berkaitan dengan pembayaran impor.		
3.	Salinan (foto copy) surat keterangan/pernyataan hibah dari pihak donatur atau dokumen sejenis yang dapat dipersamakan. (<i>catatan: diisi dalam hal buku yang diimpor merupakan hibah dari pihak-pihak di luar negeri</i>)		

KESIMPULAN:

= Memenuhi Syarat Administratif

= Tidak Memenuhi Syarat Administratif

Jakarta,
Pemeriksa

.....

**INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PENGESAHAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM
UNTUK PEMEBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KATEGORI BUKU PENYERAHAN DALAM NEGERI**

Nama Penerbit :

Alamat :

No.	Kriteria	Keleengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Mengajukan Surat Permohonan dengan dilampiri:		
	a. Jumlah Judul Buku		
	b. Judul Buku		
	c. Nama Penulis		
	d. Nama Penerbit		
	e. Tahun Penerbitan		
	f. Sasaran Peruntukan Buku		
	(Data atau informasi di atas dalam bentuk <i>Compact Disc</i> (CD))		
2.	Mengajukan Surat Permohonan dengan dilampiri:		
	a. Salinan (foto copy) identitas pemohon (seperti KTP, SIUP)		
	b. Contoh buku untuk masing-masing judul buku yang diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar setiap judul buku.		

KESIMPULAN:

= Memenuhi Syarat Administratif

= Tidak Memenuhi Syarat Administratif

Jakarta,

Pemeriksa

.....

Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2008

No	Tahun	Nama Penerbit	Jumlah	Jumlah Per Tahun	Alamat	Keterangan
1.	2003	PT. Widya Dara	69 Judul	69 judul	a.n Miniati Wahyudi, Wisma Anam Lt. 3 Jln. Teuku Cik Diro No. 12 Jakarta 10350	Impor, daftar judul buku dan keterangannya
2.	2004	PT. Widya Dara	203 Judul	203 judul	a.n Miniati Wahyud, Wisma Anam Lt. 3 Jln. Teuku Cik Diro No. 12 Jakarta 10350	Impor, daftar judul buku dan keterangannya
3.	2005	Sekolah Santa Laurensia	1 Judul	99 Judul	a.n. Dra. M.I Eko Wijayanti, M.Si, Koordinator Perpustakaan Sekolah Santa Laurensia, perumahan Alam sutera, Serpong, Tangerang	Impor, Buku dengan judul <i>New Visual Encyclopedia 320 Transparance in 4 File</i> (penerbit: TTEVisual)
4.		PT. Widya Dara	98 Judul		a.n. Miniati Wahyudi, Wisma Anam Lt. 3 Jln. Teuku Cik Diro No. 12 Jakarta 10350	Impor, daftar judul buku dan keterangannya
5.	2006	PT. Widya Dara	181 Judul	2262 Judul	a.n. Miniati Wahyudi, Wisma Anam Lt. 3 Jln. Teuku Cik Diro No. 12 Jakarta 10350	Impor, daftar judul buku dan keterangannya
6.		UT	1523 Judul		a.n Rektor UT, Jln. Cabe Raya, Ciputat Tangerang 15418	Penyerahan dari UT berupa Bahan Ajar Multimedia berupa daftar judul buku Audio video.
7.		PT. Tigaraksa Satria	8 Judul		a.n. Hernita Kurniawan, PT. Tigaraksa Satria, Jl. HR. Rasuna said Kav. B-3 Jakarta 12920	Impor, daftar judul buku dan keterangannya
8.		PT. Dian Rakyat	217 Judul		a.n. Diana Susanti, PT. Dian Rakyat, Jln. Rawagelam I No. 4 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930.	Penyerahan dari Dian Rakyat
9.		PT. Trisula Adisakti	46 Judul		a.n. Toto Sumarto, Direktur PT. Trisula Adisakti Jl. Baladewa F. 185 Jakarta 10540	Impor, daftar judul buku dan keterangannya
10.		Direktorat Sistem Informasi, Ham Dephukum dan HAM	118 Judul		a.n. Djumantoro P.Purbo, MA, Direktur Sistem Informasi HAM, Ditjen Perlindungan HAM Dephukum dan HAM RI Gedung KPK Lt. IV Jln. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920	Hibah dari Raoul Wallenberg Institute Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Perlindungan HAM Dephukum dan HAM, daftar Buku dan keterangannya
11.		Komnas HAM	41 Judul		a.n. Alikah Nuraini, Kapus Dokumentasi dan Informasi Komnas HAM Jln. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakpus 10310	Hibah dari Komnas HAM Rouff Wallenberg Institute, Swedia. dFTr buku Dn keterNGNY Daftar buku dan keterangannya.

22.		CEP-CCIT Fakultas Teknik UI	27 Judul		a.n. Dr. Ir. Bondan T. Sofyan, M.Si, CEP-CCIT FT UI, Gedung Engineering Center Lt.1, Fakultas Teknik UI, Kampus UI Depok 16424	Impor, daftar Buku dan Keteranganannya
23.		PT. Widyadara	60 Judul		a.n. Djuli. Manajer Keuangan PT. Widyadara, Menara bank Dagang Negara Lt. 24, Jln. M.H. Thamrin No. 5 jakarta 10340	Penyerahan buku terbitan dari PT. Widyadara
24.		CV. Fenross Corporation	31 Judul		a.n Effendi, CV. Fenross Corporation, Jln. Kertajaya Indah Timur XIV/12 Blok P-460 Surabaya 60117	Impor, Daftar Buku dan keteranganannya
25.		Pusham Universitas Surabaya	46 Judul		a.n. Dr. Yoan N. Simanjuntak, SH, M.Hum, Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya, Gedung Perpustakaan Lt. V Jln. Raya Kalirungkut, Tenggilis, Surabaya 60293	Hibah buku dari Raoul Wallenberg Institute Swedia, Daftar buku dan keteranganannya
26.		Fakultas Teknik UI	27 Judul		a.n. Dr. Ir. Bondan T. Sofyan, M.Si, CEP-CCIT FT UI, Gedung Engineering Center Lt.1, Fakultas Teknik UI, Kampus UI Depok 16424	Impor, daftar Buku dan Keteranganannya
27.		PT. Ichtiar Baru Van Hoove	45 Judul		a.n L.W.J Pasmans, DirekturUtama PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jln. Raya pasar Jumat No. 38 D-E, Pondok Pinang, Jakarta 12310	Penyerahan buku terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoove

No.	Tahun	Nama Penerbit	Jumlah	Jumlah Total	Alamat	Keterangan
1.	2008	CEP-CCIT FakultasTeknik UI	46 Judul		Dr. Ir. Bondan T. Sofyan, M.Si, CEP-CCIT FT UI, Gedung Engineering Center Lt.1, Fakultas Teknik UI, Kampus UI Depok 16424	Impor buku-buku untuk Pendidikan Teknologi Informasi di UI, Daftar Buku dan keteranganannya
2.		PT. Artha Komunikasi Asia	18 Judul		PT. Artha komunikasi Asia, Plaza Greet River Lt. 14 Jln. Rasuna Said Blok X-2 No. 1 Jakarta Selatan, Indonesia	Impor buku-buku pelajaran umum untuk SD, Daftar Buku dan keteranganannya
3.		Yayasan Tjipta Mas Eka Bangsa	20 Judul		a.n a.n Ferry S. Djongianto, SH.,LLM Ketua Yayasan Tjipta Mas eka Bangsa, Wisma Indah Klat,	Impor bahan bacaan penunjang bagi KBM di Sekolah Sinar Mas, Daftar Buku dan keteranganannya

					gedung B, Lantai 3, Jln. Raya Serpong Km.8, Serpong, Tangerang	
		PT. Artha Komunikasi Asia	82 Judul		a.n DR. I. Widyantoko Sumarlin, Direktur PT. Artha komunikasi Asia, Plaza Greet River Lt. 14 Jln. Rasuna Said Blok X-2 No. 1 Jakarta Selatan, Indonesia	Impor buku-buku pelajaran umum untuk SD, SMP dan SMA . Daftar Buku dan keteranganannya
4.		PT. Widyadara	7 Judul		a.n Miniati Wahyudi, Wisma Anam Lt. 3 Jln. Teuku Cik Diro No. 12 Jakarta 10350	Impor, Daftar Buku dan keteranganannya
5.		PT. Mentari Books Indonesia	150 Judul		a.n. Anna Rimba , Rukan Sentra Niaga Puri Indah Blok T1- 03, Puri Indah, Jakarta Barat	Impor buku-buku pelajaran umum untuk SD, Daftar Buku dan keteranganannya
6.		Yayasan Tjipta Mas Eka Bangsa	1000 Judul		a.n. Arthur Yahya, Wisma Indah Kiat, gedung B, Lantai 3, Jln. Raya Serpong Km.8, Serpong, Tangerang	Impor buku-buku bahan bacaan penunjang untuk Sekolah Sinar Mas, Daftar Buku dan keteranganannya
7.		Yayasan Tjipta Mas Eka Bangsa	10.452 Judul		a.n. Arthur Yahya, Wisma Indah Kiat, gedung B, Lantai 3, Jln. Raya Serpong Km.8, Serpong, Tangerang	Impor buku-buku bahan bacaan penunjang untuk Sekolah Sinar Mas, Daftar Buku dan keteranganannya
8.		PT. Gramedia Asri Media	47 Judul		a.n Herman K. Masman, Jln. Gajah Mada 109 Jakarta 11140 Indonesia	Impor buku-buku pelajaran dan penunjang untuk pendidikan Dasar s.d Perguruan Tinggi, Daftar Buku dan keteranganannya
9.		DR. Ir. Naniek Widayati, M.Ars	1 Judul		a.n. DR. Ir. Naniek Widayati, M.Ars Jln. Damai POK III No. 79, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan	Penyerahan dalam negeri, memerbitkan buku dengan judul Rumah Mayor China di Jakarta.
10.		PT. Widyadara	33 Judul	11.85 6 Judul	a.n Miniati Wahyudi, Wisma Anam Lt. 3 Jln. Teuku Cik Diro No. 12 Jakarta 10350	Impor, Daftar Buku dan keteranganannya

Sumber : Dokumen dan Rekaman dari Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Rekomendasi sebagai
Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN di Pusat Perbukuan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PUSAT PERBUKUAN

JALAN GUNUNG SAHARI (EKS KOMPLEKS SILIWANGI) JAKARTA PUSAT 10002
Telepon 021 - 3804248 (5 Saluran) Fax. 021 - 3806229
Tromol Pos 3679

Nomor : 1367 /A8.2/PT/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum

21 JUL 2008

Yth. Sdr. Herman K. Masman
Kepala Bagian Impor
PT. Gramedia Asri Media
Jln. Gajah Mada 109
Jakarta 11140

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: PPI/014/07/2008, tanggal 3 Juli 2008 perihal Permohonan Pembebasan Pajak Atas Impor Buku, bersama ini kami sampaikan hasil penelaahan terhadap judul buku yang Saudara ajukan berdasarkan sinopsis buku, yaitu sebagai berikut.

1. Judul-judul buku terlampir dapat dimasukkan dalam kategori buku pelajaran umum dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 353/KMK.03/2001, tanggal 5 Juni 2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 1 ayat 1 dan 2), serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 63/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (Pasal 1 angka 1 (3a)).
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan ternyata buku-buku tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 353/KMK.03/2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 63/KMK.03/2002, maka rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Perbukuan,


/ Dr. Sugijanto
NIP. 130 357 9406

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Perbukuan Depdiknas;
3. Kepala Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Setempat.

Lampiran Surat

Nomor : 1367 /AS.2/PT/2008

Tanggal : 21 JUL 2008

DAFTAR JUDUL BUKU YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM
ATAS PERMINTAAN PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstraksi buku	Jml Halaman	QTY
1	Principles of Economics, 4th Edition	Gregory N. Mankiw	Cengage Learning Asia Pte Ltd / 2007	Pelajaran ekonomi dengan kurikulum internasional untuk memudahkan penyelesaian mahasiswa dan penerapannya dalam priaku bisnis di laman sekarang .	936	500
2	Accounting Principles, 8th Edition, with PepsiCo annual Report ...	Jerry J. Weygant, Donal E. Kieso, Paul D., dkk	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2007	Buku dari dasar akuntansi yang membahas langkah dan metodenya yang dijabarkan secara menyeluruh untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dan praktisi akunting .	600	500
3	Fundamental Methods of mathematical Economics, 4th Edition	Alpha C. Chiang	McGraw Hill Education Asia / 2005	Buku pegangan wajib dan dasar matematika dengan kurikulum internasional untuk perguruan tinggi yang memuat contoh persoalan dan pemecahannya dibidang ekonomi .	666	500
4	Business Essentials, 5th Edition	Ebert Griffin	Prentice Hall / 2005	Dasar dalam manajemen bisnis menjadikan buku ini sangat penting untuk para mahasiswa yang mengambil study dibidangnya dilengkapi dengan beberapa kasus untuk diskusi team .	544	500
5	Introduction to Information Systems (Supporting & Transforming Business)	Rainer, Turban, Potter	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2007	Buku ini membantu mahasiswa dalam pengolahan sistem informasi khususnya manajemen bisnis dilengkapi dengan beberapa kasus beserta pemecahannya .	432	500
6	Time-Saver Standards For Building Types, 4th Edition	Joseph de Chiara, M. J. Crosbie	McGraw Hill Education Asia / 2001	Secara menyeluruh buku ini menyajikan berbagai tabel bantu suatu hunian atau area publik yang digabungkan dengan kurikulum internasional untuk mahasiswa khususnya teknik arsitektur .	1200	120
7	Structural Analysis, 3 Ed	Aslam Kassimali	Cengage Learning Asia / 2005	Pelajaran untuk mahasiswa teknik sipil dengan kurikulum internasional dan langkah, prosedur untuk analisa di tiap pembahasan persolannya dilengkapi standar ASCE .	664	120

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstrak buku	Jml Halaman	QTY
8	Engineering Economy	Blank & tarquin	McGraw Hill Education Asia / 2005	Buku untuk mahasiswa teknik yang membahas perhitungan dengan dilengkapi studi kasus, pemecahan masalah dan didasarkan kurikulum internasional.	741	120
9	LRFD Steel Design 4Ed	William T. Segui	Cengage Learning Asia Pte Ltd / 2007	Buku teknik dalam konteksasi baja dengan kurikulum internasional untuk perguruan tinggi dan memberikan contoh untuk diskusi, pemecahan masalah yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Pelajaran untuk mahasiswa teknik terutama disiplin bidang perencanaan/pendalaman transkripsi dengan kurikulum internasional dilengkapi studi kasus, analisa dan pemecahannya.	704	120
10	Traffic Engineering 3 Ed	Roger P. Roessa	Pusatun Education South Asia Pte Ltd / 2004	Buku teknik sipil ini menjelaskan berbagai konsep dan perawatannya dilengkapi persoalan dan pemecahannya untuk mahasiswa dengan kurikulum internasional	448	120
11	Principles of Foundation Engineering 6 Ed	Brata M. Das	Cengage Learning Asia Pte Ltd / 2007	Buku yang membahas teknik efektif mulai perencanaan, tempat dan kelainanburuan dengan area seklernya sebagai bekal mahasiswa dengan kurikulum internasional juga dapat digunakan untuk para praktisi aplikatif. Sertakan dan survey yang dilakukan mengambil kesimpulan bahwa baik geografi di asia atau eropa sangat berpengaruh pada perilaku bangunan hal ini membantu mahasiswa teknik untuk penguatnsergen teknik didasarkan kurikulum internasional	816	120
12	Architecture, Form, Space & Order, 3rd Edition	Francis DK. Ching	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2007	Buku yang memperkenalkan komunikasi yang memudahkan mahasiswa memahami leori komunikasi secara sistematis mengacu kurikulum internasional	608	225
13	A Global History of Architecture	Francis DK Ching, Mark M. Janszobak and Vikramaditya Prakash	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2008	Pelajaran bahasa Inggris tingkat untuk sekolah dasar mulai penguatan katakhabasa, penggunaan perbandingan kata dilengkapi simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
14	Introducing Communications Theory, Analysis and Application	Richard L. West dan Lynn H. Turner	McGraw Hill Education Asia / 2004			
15	Learning English Workbook 1	Dr Tan Cheng Lim, Leandson G. Rodilgo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd			
16	Learning English Workbook 2	Dr Tan Cheng Lim, Leandson G. Rodilgo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd			

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstraksi buku	Jml Halaman	Qty
17	Learning English Workbook 3	Dr Tan Cheng Lim, Leanaon G. Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian bahasa Inggris tingkat 3 untuk sekolah dasar mulai pengenalan tata bahasa, penggunaan perbandingan kata diungkapkan simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
18	Learning English Workbook 4	Dr Tan Cheng Lim, Leanaon G. Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian bahasa Inggris tingkat 4 untuk sekolah dasar mulai pengenalan tata bahasa, penggunaan perbandingan kata diungkapkan simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
19	Learning English Workbook 5	Dr Tan Cheng Lim, Leanaon G. Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian bahasa Inggris tingkat 5 untuk sekolah dasar mulai penguasaan tata bahasa, penggunaan perbandingan kata diungkapkan simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
20	Learning English Workbook 0	Dr Tan Cheng Lim, Leanaon G. Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian bahasa Inggris tingkat 0 untuk sekolah dasar mulai pengenalan tata bahasa, penggunaan perbandingan kata diungkapkan simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
21	Learning Grammar Workbook 1	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian tata bahasa Inggris tingkat 1 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
22	Learning Grammar Workbook 2	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian tata bahasa Inggris tingkat 2 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
23	Learning Grammar Workbook 3	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian tata bahasa Inggris tingkat 3 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
24	Learning Grammar Workbook 4	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian tata bahasa Inggris tingkat 4 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
25	Learning Grammar Workbook 5	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penelitian tata bahasa Inggris tingkat 5 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstrak buku	Jml Halaman	QTY
26	Learning Grammar Workbook B	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran bahasa Inggris tingkat 6 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
27	Learning Vocabulary Workbook 1	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 1 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
28	Learning Vocabulary Workbook 2	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 2 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
29	Learning Vocabulary Workbook 3	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 3 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
30	Learning Vocabulary Workbook 4	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 4 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
31	Learning Vocabulary Workbook 5	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 5 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
32	Learning Vocabulary Workbook B	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 6 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
33	Maths Olympiad (Junior 1 for P1 & P2)	George Lanchester	Glenwood Pubs / 1998	Buku ini memperkenalkan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum di tingkat dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	280	20
34	Maths Olympiad (Junior 2 for P2 & P3)	George Lanchester	Glenwood Pubs / 1998	Buku ini memperkenalkan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum di tingkat dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	280	20

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstrak/buku	Jml Halaman	QTY
35	Maths Olympiad (Beginner for P3 & P4)	George Leuchner	Glenwood Pubs / 1998	Buku ini memperkenalkan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum dilengkapi dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	286	20
36	Maths Olympiad (Intermediate for P4 & P5)	George Leuchner	Glenwood Pubs / 1999	Buku ini memperkenalkan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum disertai dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	296	20
37	Maths Olympiad (Advanced for P5 & P6)	George Leuchner	Glenwood Pubs / 1998	Buku ini memperkenalkan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum dilengkapi dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	280	20
38	Mastering Maths Nursery	Radhika Oberoi	Starling Publishing	Penjelasan matematika dasar untuk mengajarkan pada anak prasekolah dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
39	Mastering Maths Kindergarten	Radhika Oberoi	Starling Publishing	Penjelasan matematika dasar untuk mengajarkan pada anak prasekolah dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
40	Mastering Maths Grade - 1	Radhika Oberoi	Starling Publishing	Penjelasan matematika dasar untuk mengajarkan pada anak prasekolah dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
41	Mastering Maths Grade - 2	Radhika Oberoi	Starling Publishing	Penjelasan matematika dasar untuk mengajarkan pada anak prasekolah dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
42	Essential Atlas of Technology	Parvathi Sudha (editer)	Barron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas kemampuan manusia menggunakan alat bantu untuk meningkatkan proses kerja, dengan mengkuil perkembangan teknologi yang sempurna dilengkapi dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum	96	400

No	Judul	Pengarang	Penyedia / Tahun	Abstrak buku	Jml Mahasan	QTY
43	Essential Atlas of Astronomy	Paranon Studios (Editor)	Barron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas jejak angkasa luar yang sangat tidak terduga, jejarian planet, bintang dan benda angkasa seperti komet, meteor dan lainnya ditunjukkan dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum.	60	400
44	Essential Atlas of Geography	Paranon Studios (Editor)	Barron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas keadaan bumi dengan bilah yang terkandung didalamnya, suhu dan cuaca akibat dari perikatan daratan dan lautan juga proses alam ditunjukkan dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum.	60	400
45	Essential Atlas of Biology	Paranon Studios (Editor)	Barron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas banyak mengenai fungsi, bakteri, amuba, tumbuhan dengan soketsi alam sesuai hukum daratan, pengklasifikasi genetik untuk kelengkapan ekosistem ditunjukkan dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum.	60	400
46	Essential Atlas of Botany	Paranon Studios (Editor)	Barron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas proses pertumbuhan, pembiliran tanaman hudaan teptis, buah atau bunga untuk kelengkapan ekosistem bumi ditunjukkan dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum.	60	400
47	Essential Atlas of Physics and Chemistry	Paranon Studios (Editor)	Barron Educational Series / 2004	Buku ini mengulas energy fisika, kimia, karakteristik bunyi, Cahaya, struktur atom dan teoritanya secara lengkap disertai ilustrasi, foto berwarna dan tabel susunan berkala sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas	60	400

Kepala Pusat Perbukuan,

Dr. Sugilanto
NIP 130 357 940

Lampiran Surat
 Nomor : 1367 /AS.2/PT/2008
 Tanggal : 21 JUL 2008

DAFTAR JUDUL BUKU YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM
 ATAS PERMINTAAN PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstraksi buku	Jmlt Halaman	QTY
1	Principles of Economics, 4th Edition	Gregory N. Mankiw	Cengage Learning Asia Pte Ltd / 2007	Pelajaran ekonomi dengan kurikulum internasional untuk memudahkan penyelesaian mahasiswa dan penerapannya dalam perilaku (kenis di jaman sekarang).	936	500
2	Accounting Principles, 8th Edition, with PepsiCo annual Report ...	Jerry J. Weygant, Donald E. Kieso, Paul D., dkk	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2007	Buku dan dasar akuntansi yang membahas langkah dan metodenya yang dijabarkan secara menyeluruh untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dan praktisi akuntansi.	600	500
3	Fundamental Methods of mathematical Economics, 4th Edition	Alpha C. Chiang	McGraw Hill Education Asia / 2005	Buku pegangan wajib dan dasar matematika dengan kurikulum internasional untuk perguruan tinggi yang memuat contoh persoalan dan pemecahannya di bidang ekonomi.	668	500
4	Business Essentials, 5th Edition	Ebert Griffin	Prentice Hall / 2005	Dasar dalam manajemen bisnis menjadikan buku ini sangat penting untuk para mahasiswa yang mengambil study dibelangnya dilengkapi dengan beberapa kasus untuk diskusi kelas.	544	500
5	Introduction to Information Systems (Supporting & Transforming Business)	Rainer, Turban, Potter	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2007	Buku ini membantu mahasiswa dalam pengolahan sistem informasi khususnya manajemen bisnis dilengkapi dengan beberapa kasus beserta pemecahannya.	422	500
6	Time-Saver Standards For Building Types, 4th Edition	Joseph de Chiara, M. J. Crosbie	McGraw Hill Education Asia / 2001	Secara menyeluruh buku ini menyajikan berbagai telaah bentuk suatu hunian atau area publik yang digabungkan dengan kurikulum internasional untuk mahasiswa khususnya teknik arsitektur.	1200	120
7	Structural Analysis, 3 Ed	Aslam Kassimali	Cengage Learning Asia / 2005	Pelajaran untuk mahasiswa teknik sipil dengan kurikulum internasional dan langkah, prosedur untuk analisa di tiap pembahasan persolannya dilengkapi standar ASCE.	864	120

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstraksi buku	Jml Halaman	QTY
8	Engineering Economy	Blank & Tarquin	McGraw Hill Education Asia / 2005	Buku untuk mahasiswa teknik yang membahas perhitungan dengan dilengkapi studi kasus, pemecahan masalah dan dikerjakan kurikulum internasional.	741	120
9	LRFD Steel Design 4th Ed	William T. Segui	Cengage Learning Asia Pte Ltd / 2007	Buku teknik dalam konstruksi baja dengan kurikulum internasional untuk penguasaan tinggi dan memberikan contoh untuk diskusi, pemecahan masalah yang mudah dipahami oleh mahasiswa.	704	120
10	Traffic Engineering 3 Ed	Roger P. Roess	Pearson Education South Asia Pte Ltd / 2004	Pelajaran untuk mahasiswa teknik, terutama dalam bidang perencanaan/dengusburan transportasi dengan kurikulum internasional dilengkapi studi kasus, analisis dan pemecahannya.	816	120
11	Principles of Foundation Engineering 6 Ed	Breaja M. Das	Cengage Learning Asia Pte Ltd / 2007	Buku teknik sipil ini menjelaskan berbagai konsep dan penerapannya dilengkapi persoalan dan pemecahannya untuk mahasiswa dengan kurikulum internasional.	480	120
12	Architecture Form, Space & Order, 3rd Edition	Francis DK, Ching	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2007	Buku yang membahas teknik arsitektur mulai perancangan, terapan dan keahliannya dengan cara sekiranya sebagai bekal mahasiswa dengan kurikulum internasional juga dapat digunakan untuk para praktisi arsitektur.	440	120
13	A Global History of Architecture	Francis DK Ching, Mark M. Jarzombek and Vikramaditya Prakash	John Wiley & Son (Asia) Pte Ltd / 2006	Berkas dan survey yang dilakukan mengambil kesimpulan bahwa teknik arsitektur sangat berpengaruh pada arsitektur bangunan belia ini membantu mahasiswa teknik untuk pengembangan teknik arsitektur kemudian internasional.	816	120
14	Introducing Communication Theory, Analysis and Application	Richard L. West dan Lynn H. Turner	McGraw Hill Education Asia / 2004	Buku yang memperkenalkan komunikasi yang memudahkan mahasiswa memahami teori komunikasi secara sistematis mengacu kurikulum internasional.	808	225
15	Learning English Workbook 1	Dr Yan Cheng Lim, Leonardo G. Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran bahasa Inggris tingkat Teknik sekolahan dasar mulai pengenalan lababahas, penguasaan perbandingan kata dilengkapi simulasi untuk kegiatan kelompok kelas.	80	20
16	Learning English Workbook 2	Dr Tan Cheng Lim, Leonardo G. Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran bahasa Inggris tingkat 2 untuk simolek dasar mulai pengenalan lababahas, penguasaan perbandingan kata dilengkapi simulasi untuk kegiatan kelompok kelas.	80	20

12

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstraksi buku	Jml Halaman	QTY
17	Learning English Workbook 3	Dr Tan Cheng Lim, Leonadon G.Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran bahasa Inggris tingkat 3 untuk sekolah dasar mulai pengenalan tata bahasa, penggunaan perbendaharaan kata dilengkapi simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
18	Learning English Workbook 4	Dr Tan Cheng Lim, Leonadon G.Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran bahasa Inggris tingkat 4 untuk sekolah dasar mulai pengenalan tata bahasa, penggunaan perbendaharaan kata dilengkapi simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
19	Learning English Workbook 5	Dr Tan Cheng Lim, Leonadon G.Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran bahasa Inggris tingkat 5 untuk sekolah dasar mulai pengenalan tata bahasa, penggunaan perbendaharaan kata dilengkapi simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
20	Learning English Workbook 6	Dr Tan Cheng Lim, Leonadon G.Rodrigo	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran bahasa Inggris tingkat 6 untuk sekolah dasar mulai pengenalan tata bahasa, penggunaan perbendaharaan kata dilengkapi simulasi untuk kegiatan kelompok kelas	80	20
21	Learning Grammar Workbook 1	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran tata bahasa bahasa Inggris tingkat 1 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
22	Learning Grammar Workbook 2	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran tata bahasa bahasa Inggris tingkat 2 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
23	Learning Grammar Workbook 3	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran tata bahasa bahasa Inggris tingkat 3 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
24	Learning Grammar Workbook 4	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran tata bahasa bahasa Inggris tingkat 4 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
25	Learning Grammar Workbook 5	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Pelajaran tata bahasa bahasa Inggris tingkat 5 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20

12/1

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstrak buku	Jml Halaman	QTY
26	Learning Grammar Workbook 6	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penjelasan bahasa Inggris tingkat 6 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
27	Learning Vocabulary Workbook 1	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penjelasan untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 1 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
28	Learning Vocabulary Workbook 2	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penjelasan untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 2 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
29	Learning Vocabulary Workbook 3	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penjelasan untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 3 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
30	Learning Vocabulary Workbook 4	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penjelasan untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 4 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
31	Learning Vocabulary Workbook 5	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penjelasan untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 5 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
32	Learning Vocabulary Workbook 6	Marilyn Tan, Dr Lana Israel	Singapore Asian Publication(S) Pte Ltd	Penjelasan untuk meningkatkan pemahaman kata bahasa Inggris tingkat 6 dengan penjelasan, pemilihan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari bahasa Inggris secara benar	80	20
33	Maths Olympiad (Junior 1 for P1 & P2)	George Langsner	Greenwood Pubns / 1999	Buku ini memperkenalkan berbagai bentuk soal yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat polajiar/umum di tingkat dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap dimulai dari soal pada olimpiade matematika	280	20
34	Maths Olympiad (Junior 2 for P2 & P3)	George Langsner	Greenwood Pubns / 1998	Buku ini memperkenalkan berbagai bentuk soal yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat polajiar/umum di tingkat dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap dimulai dari soal pada olimpiade matematika	280	20

107

No	Judul	Pangarang	Penerbit / Tahun	Abstrak buku	Jml Halaman	QTY
35	Maths Olympiad (Beginner for P3 & P4)	George Leuchner	Glenwood Pubns / 1998	Buku ini mempromosikan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum di tingkat dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	280	20
36	Maths Olympiad (Intermediate for P4 & P5)	George Leuchner	Glenwood Pubns / 1998	Buku ini mempromosikan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum di tingkat dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	280	20
37	Maths Olympiad (Advanced for P5 & P6)	George Leuchner	Glenwood Pubns / 1998	Buku ini mempromosikan begitu banyak cara yang mudah untuk menyelesaikan soal matematika di tingkat pelajar/umum di tingkat dengan jawaban pada setiap soalnya secara bertahap diambil dari soal pada olimpiade matematika	280	20
38	Mastering Maths Nursery	Radhika Oberoi	Sterling Publishing	Pelajaran matematika dasar menggunakan pada anak pra-sekolah dengan penjelasan, penjelasan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
39	Mastering Maths Kindergarten	Radhika Oberoi	Sterling Publishing	Pelajaran matematika dasar untuk menggunakan pada anak pra-sekolah dengan penjelasan, penjelasan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
40	Mastering Maths Grade - 1	Radhika Oberoi	Sterling Publishing	Pelajaran matematika dasar untuk menggunakan pada anak pra-sekolah dengan penjelasan, penjelasan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
41	Mastering Maths Grade - 2	Radhika Oberoi	Sterling Publishing	Pelajaran matematika dasar untuk menggunakan pada anak pra-sekolah dengan penjelasan, penjelasan kata yang sangat mudah dipahami yang sangat membantu untuk mempelajari tambah, kurang, bentuk dan penulisan angka secara benar	25	1500
42	Essential Atlas of Technology	Parsons Studios (Edito)	Baron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas kemampuan manusia menciptakan alat dan untuk meningkatkan proses kerja dengan mengikuti perkembangan teknologi yang serempak di tingkat saja sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum	96	400

10/1

No	Judul	Pengarang	Penerbit / Tahun	Abstrak/ buku	Jml Halaman	QTY
43	Essential Atlas of Astronomy	Paramon Studios (Editor)	Baron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas jagat angkasa luar yang sangat luas termasuk, jejaran planet, bintang dan benda angkasa seperti komet, meteor dan lainnya dilengkapi dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum	96	400
44	Essential Atlas of Geography	Paramon Studios (Editor)	Baron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas keadaan bumi dengan jayra yang terkandung didalamnya, suhu dan cuaca akibat dari perbedaan daratan dan lautan juga proses alam yang dilengkapi dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum	96	400
45	Essential Atlas of Biology	Paramon Studios (Editor)	Baron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas banyak mengenai fungsi, bakteria, ameba, biotang dengan aspek atom melalui hukum Darwin, pengklasifikasian genetik untuk kolaborasi ekosistem dilengkapi dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum	96	400
46	Essential Atlas of Botany	Paramon Studios (Editor)	Baron Educational Series / 2003	Buku ini mengulas proses pertumbuhan, pembibitan tumbuhan hulan kespil, buah atau bunga untuk kelangsungan ekosistem bumi dilengkapi dengan foto sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas atau umum	96	400
47	Essential Atlas of Physics and Chemistry	Paramon Studios (Editor)	Baron Educational Series / 2004	Buku ini mengulas tentang kimia, fisika, karaktistik bentuk, cahaya, struktur atom dan reaktanya secara lengkap disertai lukisan, foto berwarna dan tabel susunan berkala sebagai penunjang pelajaran tingkat menengah atas	96	400

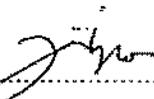
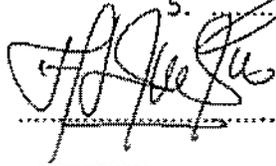
Kepala Pusat Perbukuan,

Dr. Sugjianto
NIP 130 357 940

1. Bonarsius Sipayung, M.Ak.
(Direktorat Jenderal Pajak)

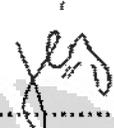
4. 

5. Mulyanto
(Biro Hukum dan Organisasi, Depdiknas)

5. 
6. 

5. Siti Wachidah, Ph.D.
(FBS Univ. Negeri Jakarta)

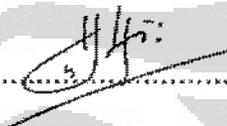
7. Dra. Nining Betawati Prihartini, M.Sc.
(FMIPA Univ. Indonesia)

7. 

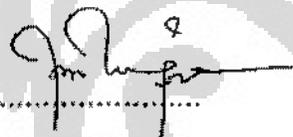

8. Ir. Wahyu Catur Wibowo, M.Sc., Ph.D.
(Fak. Ilmu Komputer Univ. Indonesia)

8.

9. Dra. Maratun Nafiah, M.Pd.
(PGSD Univ. Negeri Jakarta)

10. 

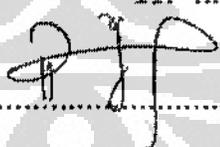
10. Dewi Susiloningtyas, S.Si., M.Si.
(FMIPA Univ. Indonesia)

10. 

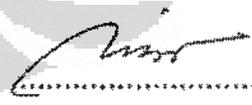
11. Dra. Samsunisa L., M.Si.

11. 

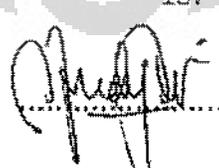
12. Ril Ellys Napitupulu, S.H, M.Si.

12. 

13. Dahnlar Nuhung, S.H.

13. 

14. Drs. Hendytio Rumbiono

14. 

15. Mulyaningsih, S.Pd.

15. 